

Informasi Iptek & Aktifitas Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SILVika

Revolusi Mental untuk Kualitas SDM yang Lebih Baik



**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(LATSAR CPNS) KLHK TAHUN 2023**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
(PKP) TAHUN 2023**

WORKSHOP PENINGKATAN SINERGITAS PENYELENGGARAAN SMK

ISSN : 0215-7233



9 770215 723001

Edisi 109 September 2023

DEWAN REDAKSI



Pembina
Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si

Pimpinan Redaksi
Dr. Budi, S.Hut., M.Sc



Sekretaris Redaksi
Esi Fajriani, S.Hut., M.Si

Anggota Redaksi

Ir. Agung Setyabudi, M.Sc
Ahmada Dian N, S.Hut., M.Si
Eka Sari Nurhidayanti, S.Si., M.Si
Ani Marianah, S.Hut., M.I.L
Elok Budiningsih, S.Hut., M.Si

SEKRETARIAT REDAKSI

Koordinator Redaksi
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota Sekretariat
Galuh Astika, S.Hut., M.Ak
Desti Putri Handayanti, A.Md



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup
dan Kehutanan



Jalan Mayjen Ishak Juarsa
Gunung Batu Kotak Pos 141
Bogor 16118

(0251) 8313622, 8337742 Ext. 112
Fax. (0251) 8323565

majalahsilvika@yahoo.com

<http://pusdiklat.bp2sdm.menlhk.go.id>

@pusdiklatsdmlhk

Pusdiklat Sdm LHK



Edisi 109
September 2023

DARI REDAKSI

Edisi kali ini, Redaksi mengetengahkan tema yang berjudul *Workshop Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan*. Tema ini diangkat dari kegiatan *workshop* yang telah dilaksanakan oleh Pusat Diklat SDM LHK. Dengan itu, Redaksi berupaya menghadirkan beragam tulisan ilmiah dan populer yang sangat menarik dan terkait dengan tema tersebut. Tulisan pertama berjudul *Arah Pengembangan Pelatihan SDM LHK Pasca Pandemi Covid-19*, yang ditulis oleh Widyaiswara Ahli Pertama di BPLHK Makassar. Tulisan kedua berjudul *Giat Cinta Alam dan Lingkungan Bagi Generasi Muda Milenial melalui Gerakan Pramuka Saka Wanabakti*, yang ditulis oleh Arsiparis Ahli Muda di Pusat Diklat SDM LHK. Tulisan ketiga sampai dengan kelima ditulis oleh Widyaiswara Ahli Madya dan Ahli Utama di Pusat Diklat SDM LHK, yang berjudul *Pengembangan SDM Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam Mendukung Peningkatan Peran Keplanologian dan Penataan Lingkungan Hidup, Fungsi Areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh dalam Konservasi Satwa Liar Mamalia Besar di Provinsi Jambi dan Profil Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan sebagai Acuan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tingkat Terampil yang Unggul*.

Tulisan lainnya berupa informasi tentang pelatihan dan *workshop* yang telah dilaksanakan di Pusat Diklat SDM LHK sampai dengan Agustus 2023, diantaranya Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pemandu Wisata Alam, Pelatihan Pembentukan Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Pelatihan Dasar-Dasar Penyuluhan Bagi Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli, *Workshop* Penyusunan Profil SMK Kehutanan, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KLHK, Pelatihan Pembibitan Vegetatif *Multi Perpose Tree Species* (MPTS), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial, Pelatihan Pengarusutamaan Gender *Massive Open Online Course* (MOOC), dan Pelatihan Pengendali Dampak Lingkungan.

Berbagai tulisan dan informasi tersebut disajikan secara apik dan menarik sebagai bagian dari penerapan pengelolaan pengetahuan dan penyebaran informasi ke khalayak ramai. Semoga **Majalah Silvika** senantiasa dapat memberikan inspirasi, motivasi dan pengembangan diri dalam berkarya.

Salam Redaksi



WORKSHOP

Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan SMK



Workshop Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan SMKKN dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 di Hotel Grand Melia Jakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 72 orang yang berasal dari Pusat Diklat SDM LHK, SMKKN Pekanbaru, SMKKN Kadipaten, SMKKN Samarinda, SMKKN Makassar dan SMKKN Manokwari, Sekretariat BP2SDM, Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, Pusat Pengembangan Generasi LHK, Badan Standardisasi Inovasi LHK, Biro Kepegawaian, Setditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Kemitraan Lingkungan, Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan



Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Badan P2SDM, dengan agenda dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama *workshop* diisi dengan pemaparan dari Kapusdiklat SDM LHK memaparkan terkait penyelenggaraan SMKKN serta pemaparan dari narasumber tentang Kebijakan Penyelenggaraan SMKKN bersama narasumber dari Kemendikbudristek tentang Pengembangan kurikulum SMK sesuai kurikulum merdeka.



Sosial Ditjen PSKL, Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Asosiasi Panel Kayu Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Sekolah Kehutanan Menengah Atas dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sesi kedua yaitu diskusi panel dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK), Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Biro Kepegawaian. Sesi terakhir adalah perumusan kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. 🍀





PELATIHAN TENAGA TEKNIS (GANIS) Pengelolaan Hutan (PH) Pemandu Wisata Alam



Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 70 / MEN LHK / SETJEN / KUM.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi (pasal 1 angka 6) disebutkan bahwa Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut GANISPH adalah setiap orang yang memiliki sertifikat kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan. Profesi GANISPH meliputi 5 (lima) bidang, yaitu 1). Perencanaan Hutan, 2). Pemanfaatan Hasil Hutan, 3). Penggunaan Kawasan Hutan, 4). Pembinaan Hutan, dan 5). Pengolahan Hasil Hutan. Salah satu kompetensi GANISPHPL di bidang Pemanfaatan Hasil Hutan adalah GANISPHPL Pemandu Wisata Alam.

Pusat Diklat SDM LHK menyelenggarakan pelatihan GANIS PHPL Pemandu Wisata Alam dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi pelaksanaan tugas GANIS PHPL Pemandu Wisata Alam yang akan memandu wisatawan sehingga proses perjalanan wisata lebih memberikan nilai edukatif, rekreatif dan mendorong keberlanjutan sumber daya alam. Pelatihan dilaksanakan secara *blended learning* pada tanggal 6 s.d 16 Juni 2023, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Praktik lapang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 Juni 2023 bertempat di Situ Gunung, Sukabumi. 🌿



PELATIHAN PEMBENTUKAN FUNGSIONAL PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. PPLH mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Jenjang jabatan fungsional PPLH terdiri dari jenjang ahli pertama, muda dan madya. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi pengawas lingkungan hidup terkait tugas dan fungsi pengawas lingkungan hidup, meningkatkan pengetahuan dalam pengawasan yang benar dan sistematis, serta mengetahui dasar hukum dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menyelenggarakan Pelatihan Pembentukan Pejabat Fungsional PPLH secara *blended learning* Tahun 2023 sebanyak 2 Angkatan. Angkatan ke-2 dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 16 Agustus 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang peserta. 🌿





Arah Pengembangan Pelatihan SDM LHK Pasca Pandemi COVID-19

Oleh:

Junaidin Ladimu

Widyaiswara Ahli Pertama, Balai Pelatihan LHK Makassar

E-Mail: junaidin.bdlhkmksr@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah mengubah cara kita mengelola pelayanan publik, termasuk dalam pola pengembangan kompetensi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan larangan berkumpul dan bepergian yang diterapkan secara ketat mengharuskan pelaksanaan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) harus berpikir kreatif dan menemukan solusi baru agar program pengembangan kompetensi dapat terus berjalan. Salah satu solusi yang telah dilakukan terkait pengembangan kompetensi SDM LHK adalah menggeser pola pengembangan kompetensi SDM yang selama ini dilakukan melalui pola pelatihan klasikal menjadi pola pelatihan non klasikal. Lembaga Administrasi Negara (2018) mendefinisikan pelatihan klasikal merupakan program pelatihan yang kegiatannya menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, contohnya seperti pelatihan teknis dengan pengajar dan peserta bertemu langsung di kelas. Selanjutnya, pelatihan non klasikal merupakan kegiatan pelatihan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, salah satu contohnya adalah pelatihan jarak jauh dan *e-learning*.

Pada saat pandemi COVID-19 terjadi, pengembangan kompetensi dengan pendekatan pelatihan klasikal tidak lagi bisa diterapkan karena risiko penyebaran penyakit yang sangat besar jika dilakukan pengumpulan orang dalam ruangan. Namun, keadaan tersebut justru membuka peluang baru untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan mengadopsi metode pelatihan jarak jauh. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan non klasikal yang dilaksanakan melalui *Learning Management*

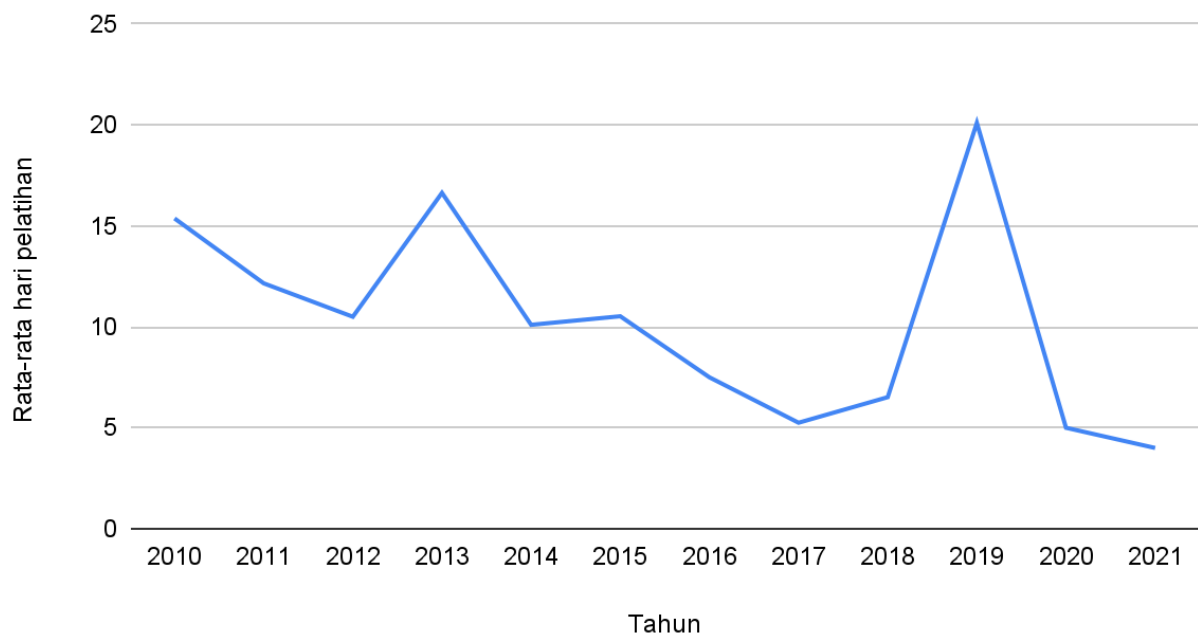
System (LMS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020 dan 2021, penulis melihat adanya potensi besar dalam pemanfaatan teknologi untuk memfasilitasi proses pelatihan secara online yang dapat menjadi katalisator untuk mengubah arah pengembangan kompetensi SDM LHK. Metode ini memungkinkan para peserta untuk tetap mengikuti pelatihan tanpa harus berkumpul di satu tempat, dan dengan itu, peningkatan kapasitas SDM LHK dapat lebih efektif dan efisien.

II. PEMBAHASAN

A. Tantangan Pelatihan LHK

Selama ini, pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan klasikal belum mampu menjawab tantangan untuk dapat menjangkau peserta pelatihan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas. Sebagai ilustrasi, jumlah SDM KLHK yang tersebar pada tahun 2022 adalah sebesar 15.471 personil yang tersebar di 13 Direktorat/Badan. Jumlah personel tersebut merupakan target sasaran personil yang harus mendapatkan peningkatan kompetensi yang jika diasumsikan bahwa setiap tahun SDM KLHK yang dapat dilatih dengan metode klasikal maksimal sebanyak 1000 personil maka dibutuhkan waktu sekitar 16 tahun untuk dapat meningkatkan kapasitas keseluruhan SDM KLHK. Asumsi tersebut belum memperhitungkan SDM sektor LHK yang berada pada pemerintahan daerah, swasta dan masyarakat. Jika SDM LHK selain personil KLHK juga diperhitungkan sebagai target sasaran SDM yang ditingkatkan kompetensinya dengan metode klasikal, maka akan dibutuhkan sumber daya waktu, tenaga dan pikiran yang sangat besar agar seluruh personel SDM tersebut mendapatkan kesempatan peningkatan kapasitas.

Tren Lama Hari Pelatihan Bidang LHK Periode 2010 - 2021



Gambar 1. Tren rata-rata lama pelatihan LHK periode 2010 - 2021 (sumber analisis data primer, 2023)

Idealnya seluruh SDM bidang LHK baik yang berada di KLHK, pemerintahan daerah, sektor swasta dan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan. Namun, selama ini hanya sebagian saja yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Pelatihan LHK. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Pelatihan LHK. Selain itu, pola alokasi anggaran menunjukkan bahwa alokasi dana untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM LHK terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir. Tren penurunan alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan dalam 10 tahun terakhir didekati dengan jumlah hari pelatihan, semakin lama hari pelatihan menunjukkan semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan seperti ditunjukkan pada gambar 1. Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa dalam periode 2010 sampai

2021, lama hari pelatihan berkurang dari rata-rata sebanyak 15 hari menjadi rata-rata 4 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran untuk pelatihan mengalami penurunan sehingga alokasi lama pelatihan dikurangi.

Di sisi lain, jumlah target SDM yang harus ditingkatkan kompetensinya menunjukkan tren yang justru mengalami peningkatan. dalam periode 2017 sampai 2022 terdapat peningkatan peserta yang signifikan pada pelatihan yang dilaksanakan menerus meningkat. Pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (2022) memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun target jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi mengalami peningkatan dari 10.803 pada tahun 2020 menjadi 35.589 pada tahun 2024 seperti pada gambar 2. Kenaikan target jumlah SDM yang meningkat kompetensinya lebih dari tiga kali lipat merupakan jumlah yang cukup besar.



Gambar 2. Target jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi 2019-2023

Selama ini strategi yang dilakukan untuk merespons jumlah anggaran pelatihan yang terus menurun adalah dengan mengurangi jumlah hari pelaksanaan pelatihan dan menambah jenis pelatihan klasikal yang dilaksanakan sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta. Namun strategi ini tidak dapat bertahan selamanya jika model pelaksanaan pelatihan yang dilakukan tetap menggunakan skenario pelatihan klasikal karena, *pertama*, ada aturan yang membatasi jumlah jam minimal pelatihan bagi ASN sebanyak 20 jam pelajaran yang harus diikuti oleh ASN setiap tahun sehingga ambang batas ini akan menjadi jumlah jam minimal pelatihan klasikal. *kedua*, keterbatasan anggaran tetap akan menjadi tantangan serius untuk meningkatkan jumlah SDM yang akan dilatih karena penganggaran SDM dengan pola pelatihan klasikal mengikuti ketentuan yang diatur dalam kurikulum. Hal ini mengakibatkan jumlah SDM yang akan dilatih melalui pola klasikal sesuai dengan jumlah maksimal pada kurikulum. Pada

akhirnya, untuk dapat mencapai target realisasi jumlah SDM yang akan dilatih membutuhkan anggaran yang cukup besar.

B. Perubahan Pelatihan Klasikal Menjadi Non Klasikal

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran pengembangan kompetensi SDM LHK yaitu menggeser pelaksanaan pelatihan klasikal menjadi pelaksanaan pelatihan non klasikal. Beberapa opsi pelatihan non klasikal yang dapat dijadikan model yakni pelatihan jarak jauh, *e-learning*, pembimbingan, *coaching* dan *mentoring*. Dengan menerapkan pelatihan non klasikal untuk pengembangan kompetensi SDM LHK akan memberikan beberapa manfaat dalam jangka panjang.

Pertama, pelaksanaan pelatihan non klasikal akan meningkatkan efisiensi anggaran. Efisiensi biaya pada pelatihan non klasikal terjadi karena

dengan perkembangan teknologi jumlah orang yang dapat mengikuti pelatihan meningkat sehingga biaya pelatihan per orang akan berkurang secara drastis. Sebagai akibatnya, target jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas dapat bertambah tanpa menaikkan biaya pelaksanaan pelatihan.

Kedua, pelatihan non klasikal akan memberikan model pelatihan yang lebih fleksibel, peserta dapat mengikuti pelatihan menyesuaikan dengan waktu peserta. Fleksibilitas pelaksanaan pelatihan non klasikal pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan dampak pembelajaran bagi peningkatan pemahaman peserta (Kasraie & Kasraie, 2010). Selain itu, studi yang dilakukan oleh Sefriani *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan metode *e-learning* menunjukkan hasil yang cukup baik selama masa pandemi.

Ketiga, akuntabilitas dan standardisasi mutu lembaga pelatihan akan lebih baik dengan pelatihan non klasikal. Dengan pola pelatihan non klasikal setiap lembaga pelatihan dapat fokus untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya terkait substansi materi pelatihan yang akan ditawarkan. Hal ini akan membuat masing-masing lembaga pelatihan akan fokus dan mengembangkan spesialisasi bidang pelatihan yang sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki. Pada akhirnya perbaikan standardisasi mutu lembaga pelatihan akan meningkatkan kualitas pelaksanaan pelatihan karena setiap lembaga pelatihan memiliki jenis-jenis pelatihan yang menjadi bidang pelatihan unggulan.

Selama ini, akuntabilitas mutu pelatihan yang dilaksanakan dengan metode non klasikal sulit untuk diukur karena pelaksanaan pelatihan yang tersebar di setiap Balai Pelatihan LHK, setiap Balai Pelatihan LHK memiliki kualitas sumber daya yang berbeda. Sebagai contoh, efektivitas pelaksanaan pelatihan kebakaran hutan akan berbeda jika dilaksanakan di balai pelatihan yang memiliki sumber daya yang memadai dibandingkan jika

dilaksanakan di lembaga pelatihan dengan sumber daya terbatas.

Sebaran widyaiswara/pelatih yang tidak merata baik secara jumlah maupun kompetensi juga menjadi persoalan pelik ketika melakukan pelatihan klasikal. Ketimpangan sebaran widyaiswara otomatis berdampak pada jenis pelatihan yang dilaksanakan dan kualitas pelatihan. Salah satu efek dari ketimpangan widyaiswara ini adalah tidak optimalnya peran widyaiswara dalam pelaksanaan pelatihan. Seringkali terjadi kompetensi widyaiswara tidak dimaksimalkan dalam pelaksanaan pelatihan karena keterbatasan anggaran sehingga jumlah pelatihan dibatasi. Oleh karena itu dalam rangka optimalisasi widyaiswara perubahan metode pelaksanaan pelatihan dari pelatihan klasikal menjadi pelatihan jarak jauh penting dilakukan.

C. Tantangan Pengembangan Pelatihan Jarak Jauh

Walaupun pergeseran pelatihan klasikal menjadi pelatihan non klasikal memberikan manfaat untuk pengembangan kompetensi SDM LHK namun untuk dapat mengubah pelaksanaan pelatihan dari klasikal menjadi non klasikal juga menyimpan beberapa tantangan yang cukup berat. Tantangan-tantangan tersebut harus diselesaikan agar pelatihan non klasikal di Kementerian LHK dapat berjalan dengan baik. Terdapat lima aspek yang harus diperbaiki untuk dapat melakukan perubahan pelaksanaan pelatihan klasikal menjadi pelatihan non klasikal.

Pertama, melakukan perbaikan peraturan atau pedoman pelatihan sehingga mendukung untuk pelaksanaan pelatihan secara non klasikal dengan beberapa metode pelaksanaan. Beberapa pedoman yang harus disiapkan diantaranya pedoman pelaksanaan pelatihan, pedoman penjaminan mutu, pedoman penyusunan kurikulum, dan pedoman evaluasi pelatihan. Oleh karena itu perlu disusun beberapa pedoman tersebut sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2019 sehingga proses



transisi pelaksanaan pelatihan dari pelatihan klasikal menjadi non klasikal dapat berjalan dengan mulus. Dengan adanya pedoman-pedoman tersebut akan memberikan pijakan yang jelas pada proses transisi pelaksanaan pelatihan klasikal menuju pelatihan non klasikal.

Kedua, menyiapkan sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola pelaksanaan pelatihan non klasikal. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan pelatihan non klasikal dapat dilakukan dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelatihan non klasikal tersebut. Beberapa personil yang terkait pelaksanaan pelatihan non klasikal dapat dikategorikan dalam SDM inti dan SDM pendukung. SDM inti diantaranya widyaiswara/*trainer*, analis pengembangan kompetensi, pengembang teknologi pembelajaran dan pranata komputer. SDM pendukung diantaranya analis kerjasama pelatihan, analis evaluasi pelatihan, dan pelaksana pelatihan. SDM

pengelola pelatihan non klasikal idealnya tersebar merata di setiap lembaga pelatihan KLHK sehingga proses transformasi pelatihan dapat berjalan dengan lancar. Kebutuhan SDM pengelola pelatihan klasikal dapat berkembang sesuai dengan transformasi, pertumbuhan pengembangan kompetensi SDM.

Ketiga, untuk dapat beralih dari pelaksanaan pelatihan klasikal menjadi pelatihan non klasikal, kesiapan infrastruktur pendukung perlu diperhatikan. Kesiapan infrastruktur meliputi kesiapan sistem pengelolaan pembelajaran (*Learning Management System/LMS*), sarana pembuatan materi pelatihan daring berupa laboratorium multimedia, kesiapan jaringan internet, pusat pengolahan data dan pusat penyimpanan dokumentasi hasil pelatihan. Saat ini, dari sisi infrastruktur untuk pelaksanaan pelatihan non klasikal, KLHK selangkah lebih maju dibandingkan lembaga pelatihan di beberapa kementerian/lembaga di Indonesia karena telah memiliki LMS yang telah beroperasi dengan baik, Namun, beberapa peningkatan kemampuan

LMS perlu dipikirkan dengan matang untuk mengantisipasi lonjakan peserta di masa yang akan datang. Beberapa aspek peningkatan LMS diantaranya adalah peningkatan kapasitas dan kecepatan mengakses LMS, peningkatan server, perbaikan antar muka LMS dan interkoneksi dengan beberapa aplikasi lain yang mendukung pengembangan kompetensi SDM LHK.

Keempat, dalam melakukan transformasi pelatihan klasikal menjadi pelatihan non klasikal dibutuhkan dukungan dan keberpihakan yang jelas dan berkelanjutan dari sisi penganggaran. Pelatihan daring akan mengakibatkan perubahan dalam struktur pembiayaan pelatihan dari penganggaran yang berdasarkan hasil menjadi penganggaran berdasarkan proses. Dengan kata lain alokasi anggaran yang mendukung peningkatan kapasitas dalam penyusunan dan pembuatan konten pelatihan dan segala hal yang mendukung untuk terbentuknya materi dan infrastruktur pelatihan daring yang matang akan lebih menjadi prioritas. Selama ini penyusunan program pelatihan dengan metode *e-learning* belum diakomodasi dalam Standar Biaya Kegiatan (SBK) kementerian LHK. SBK program pelatihan yang diakomodir selama ini masih dalam bentuk struktur anggaran pelaksanaan pelatihan klasikal. Walaupun peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) LHK terkait pelaksanaan pelatihan jarak jauh telah disusun dan mengatur struktur biaya pelaksanaan pelatihan jarak jauh. Namun struktur biaya pelaksanaan pelatihan jarak jauh sesuai keputusan kepala BP2SDM LHK belum diakomodir dalam SBK pelaksanaan pelatihan jarak jauh. Hal ini mengakibatkan program pelatihan dengan struktur anggaran *e-learning* sangat sulit untuk bisa dilaksanakan. Dukungan anggaran yang tepat pada proses produksi konten pelatihan non klasikal sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelatihan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengusulan agar biaya pengembangan pelatihan untuk menyusun konten pelatihan dapat masuk pada SBK pelatihan online. Hal ini akan mengarahkan pelatihan-pelatihan *e-learning* pada

LMS beralih dari berpusat pada pengajar menjadi berpusat pada pembelajar.

Kelima, perlu adanya sebuah sistem penghargaan bagi peserta pelatihan daring sebagai stimulus untuk peserta melakukan perubahan kebiasaan dari pelatihan klasikal menjadi pelatihan daring. Sistem penghargaan yang dibangun dapat disinergikan dengan pusat data alumni untuk melacak dan mengukur keberhasilan pelaksanaan pelatihan. Selain itu, sistem penghargaan yang dibentuk juga dapat diintegrasikan dengan sistem administrasi kepegawaian untuk mengukur indeks profesionalitas ASN (IP ASN). Sistem insentif yang diberikan kepada alumni dapat menjadi stimulus bagi alumni untuk terus melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan *e-learning*. Sebagai contoh yang diberikan dapat berupa kemudahan untuk mengikuti jenjang pelatihan setelahnya, rekomendasi jabatan sesuai kompetensinya maupun sebagai pertimbangan untuk promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Sistem penghargaan yang dirancang dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen talenta untuk mengetahui perkembangan alumni setelah mengikuti pelatihan. Sistem penghargaan terhadap peserta pelatihan non klasikal akan memberikan insentif bagi SDM LHK untuk terlibat aktif dalam pengembangan kompetensi karena ada penghargaan yang diberikan dan berpengaruh pada pengembangan karir SDM tersebut. Stimulus ini juga dapat diintegrasikan dengan rencana reformasi birokrasi untuk perbaikan kinerja. Sebagai contoh, alumni pelatihan yang memiliki kinerja sangat baik dalam proses pelatihan dapat diusulkan untuk masuk ke dalam kelompok suksesi yang akan menduduki posisi strategis ke depannya.

III. PENUTUP

Perubahan dalam melakukan pelatihan pada Kementerian LHK merupakan sebuah keniscayaan yang perlu dipersiapkan. Pandemi COVID 19 menjadi momentum untuk memacu pergeseran orientasi pelatihan dari model klasikal ke pelatihan non klasikal. Persoalan laten dalam pelaksanaan

pelatihan LHK pada lembaga pelatihan seperti jumlah peserta yang sangat banyak dan lokasi peserta yang tersebar di seluruh Indonesia, adanya tren pengetatan anggaran dalam pelaksanaan pelatihan, proses standarisasi mutu pelatihan yang masih belum berjalan dan perbedaan kualitas SDM widyaiswara antar Balai Pelatihan LHK merupakan tantangan yang dapat diselesaikan jika metode pelatihan digeser menjadi pelatihan jarak jauh menggunakan LMS. Oleh karena itu perlu dilakukan akselerasi untuk mendorong pelaksanaan pelatihan jarak jauh menggunakan LMS. Dukungan dan penyusunan peraturan dan pedoman pelaksanaan pelatihan non-klasikal, pembangunan dan peningkatan infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memadai dan kompeten sebagai pengelola pelatihan, dukungan manajemen dalam penganggaran dan sistem penghargaan bagi peserta pelatihan yang terintegrasi dengan manajemen talenta dan reformasi birokrasi menjadi bagian penting untuk transformasi pengembangan kompetensi SDM Bidang LHK. Persiapan yang matang dalam lima hal tersebut akan menentukan proses transisi dari pelatihan klasikal menuju pelatihan daring sehingga lebih siap menghadapi perubahan. 🌱

DAFTAR PUSTAKA

- Kasraie, N., & Kasraie, E. (2010). Economies Of Elearning In The 21st Century. *Contemporary Issues in Education Research (CIER)*, 3(10), 57. <https://doi.org/10.19030/cier.v3i10.240>
- KLHK. (2022). Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020—2024, Permen LHK No. 1/MENLHK/SETJEN/SET/1/2022.
- KLHK. (2019). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- LAN. (2018). Peraturan LAN No 10 tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- Sefriani, R., Sepriana, R., Wijaya, I., & Menrisal, M. (2021). Efektifitas Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4731–4737.



Giat Cinta Alam dan Lingkungan Bagi Generasi Muda Milenial Melalui Gerakan Pramuka Saka Wanabakti

Oleh:

Durahman

Arsiparis Ahli Muda, Pusat Diklat SDM LHK

E-Mail: durahman_69@yahoo.co.id

I. PENDAHULUAN

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya memiliki harapan yang besar pada Pramuka untuk dapat menjadi **Green Inspirator**, menjadi lokomotif perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup di negeri ini. Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan generasi mendatang, negara ini membutuhkan gerakan sosial yang kuat dan meluas. Gerakan Pramuka, yang dekat dengan kehidupan sosial masyarakat, diharapkan dapat turut serta berperan dalam perbaikan lingkungan hidup demi kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang dengan melibatkan kaum muda milenial.

Banyak ragam kegiatan kepedulian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Generasi muda Pramuka Saka Wanabakti, sejak diresmikan pada tanggal 19 Desember 1983, memiliki satu kegiatan ikonik yaitu menumbuhkan kecintaan terhadap pelestarian alam dan menjaga kelestarian lingkungannya melalui Krida Binawana dan Krida Reksawana. Kegiatan Krida Reksawana dilakukan di alam terbuka yang bertujuan untuk mengenalkan dasar-dasar kepedulian terhadap kecintaan akan kelestarian alam serta pengenalan lingkungan secara menyeluruh akan fungsi dan manfaat hutan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Saka Wanabakti Kota Bogor sebagai upaya menumbuhkan semangat untuk mencintai hutan dan lingkungannya pada generasi milenial adalah Kegiatan Giri Wana *Rally* yang diikuti oleh sekitar 300 orang peserta muda dari Penegak dan Pandega se-Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta termasuk siswa SMKKN Kadipaten yang mengirimkan 4 regu/Tim dalam kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan tersebut seluruh peserta Giri Wana *Rally* dan generasi milenial lainnya tidak hanya diberikan teori, namun juga diajak praktik langsung dalam kegiatan cinta alam dan lingkungan dengan dibuatnya lubang biopori atau sumur resapan yang berfungsi untuk penyerapan

air, pembuatan kompos, dan mengurangi risiko banjir. Mereka juga diajak melakukan penanaman pohon yang fungsi dan manfaatnya sangat besar bagi masyarakat sekitar.

Selain mengusung isu cinta alam dan pelestarian lingkungan, Saka Wanabakti melalui Giat Giri Wana *Rally* menyajikan konsep yang lebih luas dengan mengusung tema “Semangat Rimbawan, Lestarkan Alam, Pulihkan Negeri”, dengan melibatkan relawan masyarakat pencinta lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati kesehatan masyarakat, kepeloporan pemuda, turut serta dalam aksi penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem darat dan laut melalui jalinan kemitraan atau kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pelestarian alam dan lingkungan.

II. PEMBAHASAN

A. Kegiatan yang Telah Dilakukan Saka Wanabakti Kota Bogor dalam Upaya Membangun Generasi Milenial yang Cinta Alam dan Lingkungan

1. Pelantikan Anggota Saka Wanabakti Angkatan ke 33 di wilayah Kota Bogor dan Program mengenalkan Saka Wanabakti ke Sekolah tingkat SLTA/ sederajat termasuk Pembinaan di SMKKN Kadipaten

Berdasarkan data dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Anggota Pramuka di seluruh Indonesia saat ini berjumlah kurang lebih 21 juta jiwa. Menurut ketua Kwarnas, hal itu merupakan aset besar bangsa untuk mencetak kader-kader yang berwawasan lingkungan. Pramuka Saka Wanabakti yang ada di Kota Bogor diharapkan menjadi garda terdepan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang hijau, bersih, indah dan asri di wilayah Kota Bogor.

Pimpinan Saka Wanabakti Kota Bogor, dalam upaya pengembangan SDM telah melakukan beberapa hal, diantaranya mengadakan kegiatan

Dewan Saka dengan Program mengenalkan Saka Wanabakti ke Sekolah sekitar Bogor, yang bertujuan untuk mengenalkan, merekrut serta mendidik calon anggota baru dari sekolah-sekolah Tingkat SLTA yang ada di Kota Bogor. Melalui proses pendidikan dan penggemblengan selama 6 bulan tentang Kepramukaan dan Kesakaan serta pendalaman materi Krida Binawana, Krida Gunawan, Krida Tatawana dan Krida Reksawana, maka setiap tahunnya dilantik anggota baru Saka Wanabakti Kota Bogor agar regenerasi Anggota tetap terjaga kesinambungannya. Pelantikan Anggota Baru Pramuka Saka Wanabakti Angkatan ke 33 mendapat Kehormatan dilantik langsung oleh Pembina Saka Wanabakti Nasional yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Diklat SDM LHK Kak Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si bertempat di Gedung KSDAE Jl. Ir. H. Djuanda No. 15 Bogor Jawa Barat.

Upaya Pendidikan dan pelatihan diikuti seluruh calon anggota Saka Wanabakti Kota Bogor, dengan peserta yang berasal dari sekolah-sekolah setingkat SLTA yang berada di wilayah Bogor. Keseriusan dan kegigihan para peserta dalam memahami materi-materi yang diajarkan para instruktur dan Pamong Saka, menghantarkan mereka untuk dilantik sebagai anggota baru Saka Wanabakti. Dewan Saka setelah dilantik mempunyai kewajiban untuk melakukan pengabdian di masyarakat sebagai

anggota dan setelah memenuhi persyaratan, mereka akan dilantik sebagai Ketua dan anggota Dewan Saka. Besar harapan regenerasi pembentukan kader baru kegiatan Saka Wanabakti akan tetap berjalan dengan baik.



Gambar 1. Pemberian Materi Umum oleh Ketua Pin Saka Wanabakti Kota Bogor kepada Siswa SMK Kehutanan Negeri Kadipaten

2. Kegiatan Giri Wana Rally Pramuka Saka Wanabakti

Kegiatan ini merupakan kegiatan khusus Lomba Lintas Alam untuk Anggota Pramuka Penegak dan Pandega Saka Wanabakti. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertebal rasa cinta terhadap alam dan lingkungannya



Gambar 2. Pelantikan Pengurus Dewan Saka Anggota Saka Waanabakti Kota Bogor oleh Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

serta memperkokoh rasa kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pada Generasi Milenial Pramuka baik yang ada di bawah binaan Saka Wanabakti, Saka Kalpataru maupun Saka lainnya serta Pramuka Gugus Depan (Gudep).

Adapun Tujuan dari kegiatan *Giri Wana Rally* adalah untuk menggelorakan semangat kepeloporan pemuda di bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, serta menumbuhkan minat sebagai relawan di bidang lingkungan melalui peran aktif pramuka dalam menjaga kesehatan lingkungan, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem darat dan laut serta mendorong lebih banyaknya kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas hutan dan lingkungannya.



Gambar 3. Tenaga Ahli Menteri LHK, Sekum Sakanas Kalpataru dan Wanabakti, Kepala Balai TN. Gn. Halimun Salak, Kwarda Jabar dan Ketua Panitia hadir dalam Pembukaan GWR.

Kegiatan *Giri Wana Rally* merupakan implementasi Program Kerja Dewan Saka Wanabakti Kota Bogor periode 2021 – 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk pengenalan lingkungan hutan dan manfaatnya pada generasi muda pramuka. Lokasi yang kami pilih adalah Bumi Perkemahan Gunung Bunder TN Halimun Salak, dengan harapan agar para peserta dalam melakukan perjalanan tersebut akan disuguhi aneka tanaman kehutanan baik tanaman komersial (Jati dan Mahoni) juga tanaman rimba.

3. Kegiatan penanaman pohon, pembuatan lubang biopori dan sekaligus sosialisasi pada generasi milenial akan pentingnya mencintai alam dan lingkungannya

Kegiatan penanaman pohon dan pembuatan lubang biopori dilaksanakan di Area Pondok Pesantren Jabal Mubarak Cisarua Bogor, dengan jumlah bibit yang ditanam mencapai 300 pohon dari berbagai jenis utamanya jenis-jenis pohon produktif. Praktik kegiatan Cinta Alam dan Lingkungan dilakukan dengan cara dibuatnya sumur resapan Lubang Biopori pramuka dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi Cinta Alam dan Lingkungan dilaksanakan di Hotel Griya Asteoty yang hadir oleh 40 peserta. Diharapkan ke depan ada kerjasama- kerjasama lainnya dengan instansi terkait yang ada di wilayah Bogor.



Gambar 4. Ketua Pin Saka Wanabakti Kota Bogor beserta anggota Dewan Saka sedang menanam pohon untuk mengedukasi Masyarakat agar mau menanam pohon di lingkungannya



Gambar 5. Pembuatan lubang Biopori/sumur Resapan sedalam 1,5 meter.



Gambar 6. Peserta Perkemahan Giri Wana Rally di Gunung Bunder Bogor

Kegiatan penanaman pohon, pembuatan sumur resapan dan sosialisasi cinta alam dan lingkungan, dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda milenial khususnya pada para pemuda Pramuka Saka Wanabakti Kota Bogor dan juga generasi muda masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga alam dan lingkungan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya banjir, longsor serta lingkungan yang lebih asri dan memiliki udara yang segar.

4. Kegiatan Giat susur sungai

Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat di sekitarnya agar mereka mau peduli terhadap kebersihan sungai dan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar mereka, sehingga masyarakat sekitar bantaran sungai teredukasi untuk sama-sama menjaga kebersihan sungai. Kegiatan susur sungai dilakukan di dua tempat yaitu Sungai Ciherang Ciomas yang ada di Perumahan Pondok Kencana Permai Kelurahan Padasuka Ciomas Bogor dan Program Bersuci (Bebersih Sungai Ciliwung), suatu kegiatan pembersihan bantaran Sungai Ciliwung yang melibatkan Masyarakat sekitar.

Selain Giat Susur Sungai, masyarakat juga dibagi bibit pohon produktif gratis (bantuan dari BPDAS Citarum Ciliwung) untuk ditanam di

halaman atau kebunnya dalam upaya menjaga lingkungan tetap sejuk dan sehat. Adapun bibit pohon yang dibagi berupa pohon mangga, nangka, jambu merah, petai dan alpukat.



Gambar 7. Penyerahan Bibit Tanaman pada Masyarakat (Lurah Padasuka)

Kegiatan lainnya yang dilakukan dalam rangka menanamkan Cinta Alam dan Lingkungan adalah kegiatan Bersuci (Bebersih sungai Ciliwung) yaitu membersihkan Sungai dari sampah-sampah yang

berserakan di bantaran Sungai Ciliwung, Kampung Bebek Kedunghalang, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitaran sungai Ciliwung dan bisa mengedukasi warga sekitar untuk selalu menjaga kebersihan dan rutin untuk membersihkan sampah yang ada di sekitaran sungai Ciliwung.



Gambar 8. Giat Bersuci (Bersihkan Sungai Ciliwung) yang melibatkan Masyarakat setempat

Kesadaran dan kepedulian warga baru pada tahap wacana dan obrolan belaka, namun aksinya untuk bersih-bersih sungai tidak pernah menjadi gerakan warga yang masif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, generasi milenial dan Masyarakat sekitar Sungai diedukasi untuk dapat mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan khususnya akan kebersihan sungai Ciliwung, dalam Giat Bersuci.

B. Pentingnya Peran Instansi Vertikal Kementerian LHK dalam mendukung dan memfasilitasi berbagai kegiatan positif Pramuka Saka Wanabakti

Pramuka merupakan gerakan pendidikan kependuan untuk kaum muda dengan dukungan dan bimbingan anggota dewasa. Langkah-langkah pembinaan ini bergerak maju menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan kaum muda milenial serta masyarakat. Adapun Saka Wanabakti, yang merupakan Satuan Karya dalam Gerakan Pramuka memberikan anggotanya bekal pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, serta menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan lingkungannya.

Melalui Gerakan Pramuka ini, yang sebagian besar anggotanya merupakan generasi milenial diharapkan mampu menularkan kepedulian akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungannya pada kaum milenial lainnya melalui Gerakan Pramuka.

Saka Wanabakti Kota Bogor, sebagai Gugus depan binaan Saka Wanabakti Tingkat Nasional, diminta untuk aktif dalam membangun dan berpartisipasi langsung dalam berbagai kegiatan yang positif, baik di masyarakat maupun di kegiatan generasi muda pramuka di sekolah-sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP sederajat) dan Menengah Atas (SMA/SLTA sederajat). Maka dari itu, perlu dibuat perencanaan yang dituangkan dalam suatu rencana kegiatan strategis jangka panjang untuk membangun kegiatan kepramukaan di wilayah Kota Bogor.

Diperlukan kepedulian yang besar terhadap keberlangsungan Saka Wanabakti Kota Bogor dari para kepala UPT lingkup Kementerian LHK yang ada di Bogor. Kontribusi mereka diharapkan dapat menjadi pemantik dan pendorong yang efektif bagi generasi muda agar lebih peduli terhadap kelestarian hutan dan lingkungan.

Mengutip sebuah semboyan “kalau bukan, kita siapa lagi?”. Hal itulah yang harus disadari bersama, bahwa kalau bukan kita, maka siapa lagi yang akan peduli terhadap keberlangsungan Saka Wanabakti. Mereka merupakan anak kandung rimbawan, yang senantiasa berkontribusi positif dalam membangun generasi muda yang peduli terhadap kelestarian hutan dan lingkungan melalui Gerakan Pramuka.

1. Rekrutmen Anggota dan Pelantikan

Dalam perekrutan anggota baru Saka Wanabakti ada mekanisme dan prosedur tetap yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan Pramuka. Hal yang terpenting dalam upaya rekrutmen anggota baru Saka Wanabakti adalah bagaimana anggota khususnya Dewan Saka, bekerja tanpa lelah dan suka rela untuk mengenalkan Saka Wanabakti pada sekolah-sekolah setingkat SLTP dan SLTA sederajat (Gudep) yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Pengenalan dan promosi kegiatan saka wanabakti dilakukan melalui berbagai media

sosial, datang ke sekolah secara langsung dengan Program *Go to School*, maupun pameran dan perkemahan Pramuka.

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak saja membutuhkan pikiran dan tenaga tapi juga biaya. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan dari Instansi Vertikal KLHK selaku Ketua dan Pembina Pramuka Saka Wanabakti dan Kalpataru Nasional, khususnya yang ada di wilayah Bogor sangat diharapkan, agar program kegiatan Saka Wanabakti dapat berjalan dengan baik dan program rekrutmen dapat terlaksana sesuai target.

Pembinaan terhadap siswa SMKKN Kadipaten di bidang kepramukaan perlu ditingkatkan dan perlu diberi pendalaman Materi Saka Wanabakti. Hal tersebut karena para siswa, walaupun Sekolah secara umum merupakan anggota pramuka Gugus Depan (Gudep), tetapi arah minatnya sudah ke Saka Wanabakti. Hal tersebut juga terlihat dari pemakaian logo Saka Wanabakti di lengan baju Pramuka siswa SMKKN kelas 10 (sepuluh), sehingga pembekalan materi saka wanabakti perlu untuk dilakukan.

Secara keilmuan di sekolah yang mereka pelajari sudah sejalan dengan 4 Krida yaitu krida Binawana, krida Tatawana, krida Gunawan dan Krida Reksawana yang ada di Saka Wanabakti, dengan kegiatan pramuka para siswa dapat mengaplikasikannya untuk kegiatan bermasyarakat

Gambar 9. Pembinaan Mental, Keberanian dan melatih Kedisiplinan Siswa SMKKN Kadipaten melalui Kegiatan Pramuka Saka Wanabakti.



Kepala Sekolah SMKKN Kadipaten dan Ketua Pimpinan Saka Wanabakti Kota Bogor serta Kwardcab Majalengka, telah bersepakat untuk

melakukan pembinaan dan pelatihan terkait kesakaan sesuai dengan jadwal ekstra yang ditetapkan pihak sekolah. Adanya pembinaan dan pelatihan yang teratur sesuai ketentuan diharapkan para siswa memiliki kemampuan dan keterampilan dinyatakan lulus, maka siswa tersebut bisa dilantik sebagai Anggota baru Saka Wanabakti Nasional.

2. Giat Giri Wana Rally, ternyata banyak diminati para kaum muda milenial baik dari kontingen Pramuka Saka Wanabakti maupun dari Pramuka umum yang ada di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Kerja keras dari teman-teman Panitia, Dewan Saka dan juga Kerjasama dengan Saka Bayangkara, Saka Bhakti Husada dan Saka lainnya yang ada di wilayah kota Bogor sangat baik sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini tak lepas dari kontribusi Pimpinan Saka Kalpataru dan Wanabakti Nasional yang mendukung penuh kegiatan ini, dengan jumlah dan kualitas piala yang sangat menarik ditambah Piala Bergilir Ibu Menteri LHK untuk juara umumnya.

3. Kegiatan lainnya yang positif seperti Giat Bersuci, Susur Sungai Ciomas, Pembagian bibit Tanaman dan Giat Tanggap Bencana, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga keberadaan Saka Wanabakti di masyarakat Bogor khususnya bisa dirasakan, dengan moto kami Saka Wanabakti Kota Bogor Jaya di rimba wibawa di Kota.

III. KESIMPULAN

1. Sesuai Harapan Ibu Menteri LHK bahwa Pramuka dapat menjadi **Green Inspirator**, menjadi lokomotif perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup di negeri ini. Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan generasi mendatang, negara ini membutuhkan gerakan sosial yang kuat dan meluas. Gerakan Pramuka, yang dekat dengan kehidupan sosial masyarakat, diharapkan dapat turut serta berperan dalam perbaikan lingkungan hidup demi kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang dengan melibatkan kaum muda milenial. Olehnya itu perlu adanya dukungan dari instansi vertikal Kementerian LHK (BSI,

Pusat Diklat SDM LHK, BPDAS, KSDAE, PKTL dan Perum Perhutani) yang ada di Wilayah Bogor baik secara moril dan materiil agar keberlangsungan dan regenerasi anggotanya tetap terjaga dan bertambah terus baik kualitas maupun kuantitasnya. Saat ini, Saka Wanabakti Kota Bogor telah memiliki 34 angkatan sejak berdiri pada Desember 1983.

2. Khusus untuk Pembinaan siswa SMKKN Kadipaten, Pusat Diklat SDM LHK telah bekerjasama dengan Kepala Sekolah SMKKN Kadipaten dan Ketua Pimpinan Saka Wanabakti Majalengka dalam Pembinaan Siswa sebagai calon Anggota Saka Wanabakti Nasional, sehingga diharapkan dengan masa pembinaan selama 1 tahun mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan serta jiwa

kepramukaan Saka Wanabakti dan siap untuk dilantik serta mengabdikan pada Sekolah sebagai duta lingkungan hidup dan Kehutanan di masyarakat.

3. Kegiatan Bersuci, susur sungai, pembagian bibit tanaman produktif ke masyarakat dan Giat Tanggap Bencana, perlu diagendakan rutin setiap tahunnya dan kualitasnya perlu ditingkatkan.
4. Giat Giri Wana *Rally* yang memperebutkan Piala Menteri LHK, diagendakan untuk dilaksanakan setiap 3 tahun sekali dan akan melibatkan generasi muda Milenial baik dari Kontingen Pramuka Saka Wanabakti maupun dari Pramuka umum yang ada di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. 🌿



Gambar 10. Kak Ipam (Staf Ahli Bidang Generasi Muda dan Kepramukaan) menyerahkan Piala Bergilir Menteri LHK ke Ketua Panitia



Pengembangan SDM Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Dalam Mendukung Peningkatan Peran Keplanologian dan Penataan Lingkungan Hidup

Oleh:

Gamin

Widyaiswara Ahli Madya, Pusat Diklat SDM LHK

E-Mail: gamingessa@gmail.com

ABSTRACT

The target for establishing forest areas that requires fast completion, needs to get support from various parties, includes human resources preparation. This paper uses participatory research methods and literature studies to obtain data. The information and analysis presented and outlined using the Analysis, Design, Develop, Implementation, and Evaluation (ADDIE) framework. A teamwise requirement analysis between the Center for Education and Training of Human Resources for Environment and Forestry (Pusdiklat SDM LHK) and the Directorate General of Forestry Planning and Environmental Management (Ditjen PKTL) obtained several types of competency development needed including target participant. Some of the designs for the development of the required competencies have been prepared by the LHK HR Education and Training Center, others have been jointly prepared, and the rest will be prioritized in the future. Some of the designed materials are electronic teaching materials provided in the Learning Management System (LMS), others in printed or non-printed teaching materials for offline learning activities. Implementation of training are practiced in an integrated manner between online and offline. The instructors are integration team of lecturers from the LHK HR Training Center, widyaiswara from the Environmental and Forestry Training Center (BPLHK), tutors from the Directorate General of PKTL, and tutors from the Center for Consolidation of Forest Areas and Environmental Management (BPKHTL). Competency development evaluation is done during the learning process and will be held at the earliest six months after the training. The integration of the implementation of this competency development can be replicated with BPLHK as joint executor of BPKHTL across Indonesia.

Keywords: competency development, PKTL, ADDIE, integration

I. PENDAHULUAN

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11/2020 Tentang Cipta Kerja, pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus menyelesaikan penetapan kawasan paling lambat pada tahun 2023. Hal ini merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari UU No.11/2020. Dukungan melalui kebijakan juga diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan menjadi bagian Program Strategis Nasional dalam kelompok Program Pemerataan Ekonomi. Dukungan kebijakan tersebut diwujudkan KLHK yaitu menyelesaikan 100% tata batas kawasan hutan dengan target hingga tahun 2023 adalah sepanjang 90.928,38 km dengan potensi penetapan kawasan hutan pada tahun 2021, 2022 dan 2023, yaitu seluas $\pm 36.363.621$ Ha (Ilham, 2021).

Selain melalui dukungan regulasi, strategi yang ditempuh untuk mencapai penetapan kawasan hutan 100%, yaitu melalui dukungan manajemen kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan ukur yang ditempuh dengan pemenuhan tenaga ukur dan alat ukur melalui perbantuan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) seluruh Indonesia yang telah selesai melakukan proses tata batas, dan melalui peningkatan kapasitas SDM. Dalam Ilham (2021), Wakil Menteri (Wamen) LHK-Alue Dohong mengatakan bahwa peran serta dan dukungan dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mencapai target penetapan kawasan hutan 100% di tahun 2023.

Pada awal tahun 2022, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2SDM) merilis aksi korektif yang dilakukan tahun ini antara lain penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mencapai target penyuluhan dan pendampingan di dalam dan di luar kawasan hutan, serta mendorong pelaksanaan

pemetaan kompetensi SDM untuk seluruh SDM LHK. Selain itu optimalisasi *e-learning* dan pembelajaran jarak jauh dalam penyelenggaraan pelatihan melalui identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan melalui SPEKTRA juga akan dilakukan sebagai aksi korektif pengembangan SDM LHK (Karo Humas KLHK, 2023).

BP2SDM sebagai Badan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam peningkatan kapasitas SDM, sesuai arahan Wamen dan aksi korektif BP2SDM tersebut, tentu turut terlibat dalam peningkatan kapasitas SDM guna mendukung percepatan penetapan kawasan hutan itu. Sejalan dengan prinsip ADDIE (*Analysis of Need, Desain Programme, Develop Material, Implemation, dan Evaluation*) (Branch, 2009) maka BP2SDM telah melakukan serangkaian pertemuan, koordinasi dari menganalisis hingga melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk SDM bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL). Bagaimana analisis kebutuhan dilakukan, desain program apa yang dibuat, bagaimana implementasi atau pelaksanaannya, dan evaluasinya dapat disimak pada tulisan ini.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode partisipatif dan studi literatur. Partisipatif ini menjadi pilihan atas dasar pengalaman mengikuti beberapa proses pertemuan, koordinasi, mendesain program serta melaksanakan kegiatan. Literatur menjadi metode pelengkap mengingat sebagian data diperoleh melalui penelusuran laporan, berita *online*, dan dokumen-dokumen.

II. ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BIDANG PKTL

Kegiatan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi SDM bidang PKTL dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi antara Ditjen PKTL dengan BP2SDM. Tenaga fungsional teknis dan tenaga pelaksana teknis lingkup Ditjen PKTL terdapat sejumlah 852 orang dengan 602 tenaga fungsional dan 250 pelaksana baik di pusat maupun di daerah (BPKHTL Wilayah I sampai dengan wilayah XII). Tenaga fungsional teknis terbanyak adalah Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sebanyak sejumlah 448 orang, Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) 24 orang, Surveyor Pemetaan (SURTA) 89 orang, dan Perencana 41 orang (Sekditjen PKTL, 2022).

Sejak tahun 2010 hingga akhir 2022, sebagian kecil SDM tersebut (197 dari 852 orang) telah mengikuti pelatihan ataupun bimbingan teknis bidang planologi kehutanan. Sementara sebagian besar dari personil telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait bidang tata lingkungan (598 dari 862 orang).

Dari jumlah tenaga fungsional dan tenaga pelaksana tersebut 655 orang masih membutuhkan pelatihan terkait Planologi Kehutanan khususnya Pengukuran dan Pemetaan, sedangkan sebanyak 254 orang membutuhkan pelatihan atau bimbingan teknis terkait tata lingkungan (Tabel 1).

Jenis-jenis pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk bidang tata lingkungan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Rekapitulasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

No	Satker	Jumah	Sudah Diklat/ Bimtek	Pensiun, Mutasi	Kebutuhan Diklat
1	Fungsional	602			
2	Pelaksana	250			
	Total Tenaga Teknis	852			
	Total telah Diklat/Bimtek Penataan Batas		286	89	$852 - 286 + 89 = 655$
	Total telah Diklat/Bimtek Tata Lingkungan		598		$852 - 598 = 254$

Sumber : (Sekditjen PKTL, 2022)

Tabel 2. Jenis pengembangan kompetensi bidang tata lingkungan yang dibutuhkan.

No	Pelatihan yang dibutuhkan	Pelaksana	Estimasi peserta	Keterangan
1	Dasar-dasar Amdal	Pusdiklat SDM LHK	353	• Review Kursil (2022) • Penyesuaian Modul dengan kebijakan baru (2023)
2	Penilaian Amdal + Bimtek Penilaian Amdal	-	-	• Review Kursil Pelatihan Penilaian Amdal (2022) • Penyesuaian Modul dengan kebijakan baru (2023)
3	Penyusunan KLHS	Pusdiklat SDM LHK	94	Kursil sedang disusun (2022)
4	Validator KLHS	Pusdiklat SDM LHK	65	Modul akan disusun tahun 2023
5	Validator RPPLH	Pusdiklat SDM LHK	65	Belum ada Kursil
6	Auditor Lingkungan Hidup	Pusdiklat SDM LHK	24	• Kursil telah ditetapkan oleh Kapusdiklat SDM LHK Nomor: SK.180/Dik/PEPE/Dik-2/8/2020 • Belum ada modul
7	Pengendalian Pencemaran Air	Pusdiklat SDM LHK	24	• Kursil harus direview menyesuaikan dengan kebijakan terbaru • Modul harus disesuaikan dengan kursil hasil review
8	Pengendalian Pencemaran Udara	Pusdiklat SDM LHK	24	• Kursil harus direview menyesuaikan dengan kebijakan terbaru • Modul harus disesuaikan dengan kursil hasil review
9	Pengendalian Kerusakan lahan	Pusdiklat SDM LHK	24	• Kursil harus direview menyesuaikan dengan kebijakan terbaru • Modul harus disesuaikan dengan kursil hasil review
10	Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Pusdiklat SDM LHK	512	Belum ada kursil
11	Perencanaan Lingkungan dan Pembangunan	Bappenas	63	Kurikulum Bappenas
12	Bimtek Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa LH Tinggi Terkait Air	Direktorat PDLKWS	562	Pedoman Bimtek Direktorat PDLKWS

Sumber: (Nurhidayati, 2022)

III. DESAIN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Sebagai institusi pendukung dalam mewujudkan program KLHK dengan kewenangan dalam pengembangan kompetensi SDM, BP2SDM mengambil langkah-langkah selanjutnya dengan menggunakan prinsip ADDIE, yakni setelah analisis (*analyse*) berikutnya adalah desain program (*design*), *develop material* dengan membangun kelas pelatihan di LMS, melaksanakan (*implementation*) dan mengevaluasi (*evaluation*).

Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi, selanjutnya BP2SDM melalui Pusat Diklat SDM LHK mendesain program pengembangan kompetensi. Desain pengembangan kompetensi ini dirancang dalam bentuk kurikulum pelatihan maupun pedoman bimbingan teknis. Sejalan dengan UU 5/2014 tentang ASN dengan istilah peningkatan kapasitas SDM ASN berganti menjadi Pengembangan Kompetensi (dapat berupa pendidikan, pelatihan, seminar kursus, penataran, dan sebagainya). Pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara (Perlan) Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS dimana terdapat dua jalur besar: melalui pendidikan dan melalui pelatihan. Jalur pelatihan dapat dilakukan dengan cara : 1) Klasikal dan 2) non Klasikal. Klasikal ada 12 bentuk: a. pelatihan struktural kepemimpinan; b. pelatihan manajerial; c. pelatihan teknis; d. pelatihan fungsional; e. pelatihan sosial kultural; f. seminar/konferensi/sarasehan; g. workshop atau lokakarya; h. kursus; i. penataran; j. bimbingan teknis; k. sosialisasi; dan/ atau l. jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.

Sedangkan non klasikal terdiri atas: a. *coaching*; b. *mentoring*; c. *e-learning*; d. pelatihan jarak jauh; e. detasering (*secondment*); f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*); g. patok banding (*benchmarking*); h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; i. belajar mandiri (*self development*); j. komunitas belajar (*community of practices*); k. bimbingan di tempat kerja; l. magang/praktik kerja; dan m. jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya (Pasal 28 dan 29). Maka desain pengembangan kompetensi untuk SDM bidang

PKTL ini adalah merupakan bagian dari jalur-jalur tersebut. Desain program dipisahkan menurut bidang planologi kehutanan dan menurut bidang tata lingkungan.

A. Desain program bidang Planologi Kehutanan

Terdapat 5 (lima) jenis pengembangan kompetensi yang telah didesain dalam bentuk kurikulum dan atau pedoman terkait planologi kehutanan. Jenis pengembangan kompetensi tersebut adalah (Pusdiklat SDM LHK, 2023): 1) Kurikulum Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan Hutan, 2) Kurikulum Pelatihan Sistem Informasi Geografis untuk Operator, 3) Pengembangan Kompetensi Administrasi dan Pelaporan Hasil Penataan Batas, 4) Pedoman Bimbingan Teknis Penandaan Batas dan Andil Garapan Areal Persetujuan Ijin Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan 5) Kurikulum Pelatihan Penggunaan Drone untuk Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Desain program bidang Tata Lingkungan

Terkait tata lingkungan telah didesain 10 (sepuluh) program pengembangan kompetensi dalam bentuk kurikulum dan atau pedoman. Desain tersebut adalah sebagai berikut (Pusdiklat SDM LHK, 2023):

1. Kurikulum Pelatihan Dasar Amdal
2. Kurikulum Pelatihan Penilai Amdal
3. Pedoman Bimtek Penilai Amdal
4. Kurikulum Pelatihan Penyusunan KLHS
5. Kurikulum Pelatihan Validator KLHS
6. Kurikulum Auditor Lingkungan Hidup
7. Kurikulum Pelatihan Pengendalian Pencemaran Air
8. Kurikulum Pelatihan Pengendalian Pencemaran Udara
9. Kurikulum Pelatihan Pengendalian Kerusakan Lahan
10. Kurikulum Pelatihan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

IV. DESAIN MATERIAL PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* (LMS)

Materi-materi pembelajaran sebagian besar telah disiapkan baik berupa modul konvensional, modul elektronik, bahan paparan, bahan diskusi, bahan studi kasus, lembar penugasan. Mulai masa pandemik Covid-19, penyelenggaraan pengembangan kompetensi di KLHK dilaksanakan setidaknya adalah *blended learning*. Meskipun demikian desain pembelajaran yang direncanakan dan materi yang disediakan memungkinkan dilaksanakan secara *full e-learning*, tatap muka, maupun gabungan dari keduanya (*blended learning*).

Selain materi pembelajaran, sesuai kebijakan terkini yang setidaknya pengembangan kompetensi dilakukan secara *blended learning*, maka setiap jenis pengembangan kompetensi disediakan kelas maya pada *Learning Management System* (LMS) pada LMS KLHK. Bahan-bahan pengembangan kompetensi mulai jadwal, modul konvensional, modul elektronik, lembar penugasan, sumber belajar lain, kuis, ujian komprehensif, serta jejak digital pembelajaran semua disediakan dalam LMS tiap jenis pengembangan kompetensi.

Material peralatan pembelajaran untuk Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan Hutan sebagian besar menggunakan peralatan yang dimiliki BPKHTL masing-masing di mana peserta ditugaskan. Sebagian Pusdiklat SDM LHK meminjam peralatan GNSS Type GeoXT 3000 dari BPKHTL VIII Denpasar.

V. IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan Hutan yang diselenggarakan untuk mendukung percepatan pengukuran kawasan hutan 100% tahun 2023, telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) angkatan terdiri dari 37 orang yang berasal dari BPKHTL di Indonesia dan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan. Beberapa pelatihan terkait bidang tata lingkungan juga telah dilaksanakan.

Pengajar untuk pengembangan kompetensi

bidang PKTL ini, BP2SDM memiliki tenaga jabatan fungsional Widyaiswara sebanyak 35 orang yang berkedudukan di Pusat Diklat SDM LHK Bogor, dan 7 (tujuh) Balai Pelatihan LHK di Pematang Siantar, Pekanbaru, Bogor, Kadipaten, Makassar, Samarinda, dan Kupang. Dari jumlah tersebut sebagian besar adalah widyaiswara bidang planologi kehutanan (28 orang). Sementara bidang tata lingkungan kurang dari 10 orang.

Selain widyaiswara, tenaga pengajar pada pengembangan kompetensi bidang PKTL ini juga berintegrasi dengan lembaga terkait. Pejabat struktural maupun pejabat fungsional pada Direktorat Jenderal PKTL dan Balai PKTL serta Dinas Lingkungan Hidup adalah mitra potensial sebagai tenaga pelatihan untuk pengembangan kompetensi SDM. Selain tenaga pengajar non widyaiswara, mereka juga berperan sebagai mentor terhadap peserta pengembangan kompetensi yang harus belajar bersama atasan atau rekan kerja di tempat kerjanya.

Amanah PP 11 tahun 2017 yang diperbaharui melalui PP 17 tahun 2020 adalah bahwa pengembangan kompetensi ASN perlu dilakukan secara terintegrasi. Integrasi ini dapat berupa integrasi sumber belajar (tenaga pengajar, mentor, tutor, *coach*), pendanaan, peralatan, dan penentuan kebutuhannya.

Untuk bidang Planologi Kehutanan khususnya Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan Hutan telah dilatih melalui 41 tenaga pengajar melalui *Training of Trainer* (ToT) Substansi Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan Hutan pada akhir bulan Februari hingga awal Maret 2023. Pesertanya berasal dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, Direktorat Pengukuhan Ditjen PKTL, Pusdiklat SDM LHK dan Balai Pelatihan LHK.

Dari sepuluh program pengembangan kompetensi yang telah didesain terkait tata lingkungan, hingga tulisan ini dibuat belum ada yang dilaksanakan. Beberapa program akan diimplementasikan tahun 2023 dan yang lain pada tahun 2024 (Pusdiklat SDM LHK, 2023).

VI. EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi dilaksanakan terdiri dua tahap. Evaluasi penyelenggaraan program segera setelah pengembangan kompetensi dilaksanakan, dan evaluasi pasca pengembangan kompetensi, yakni paling cepat enam bulan setelah peserta kembali ke tempat tugas masing-masing. Untuk evaluasi penyelenggaraan telah dilakukan di masing-masing penyelenggaraan program dan tercatat di LMS setiap program.

Pada pelaksanaan Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan Hutan secara *blended learning* diperoleh catatan-catatan (Gamin, 2023): a) pelatihan berjalan cukup lancar, sesuai rencana dan kurikulum yang ditetapkan, b) penguasaan materi peserta pelatihan pada umumnya cukup optimal, dan c) peserta telah mampu melakukan pengenalan alat, melaksanakan pengukuran di lapangan, mengolah data dan mengoreksi, hingga membuat peta sesuai ketentuan kartografis dan peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian LHK. Saran yang penting diperhatikan dari pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan Hutan ini adalah perlunya mempertahankan komitmen kerjasama penyelenggaraan pelatihan sesuai mekanisme penyelenggaraan pelatihan demi menjaga mutu diklat. Integrasi ini merupakan penerapan *Corporate University* (CorPU) sesuai amanah PP.11/2017 juncto PP.17/2020. Perlu diagendakan kegiatan penyusunan modul pelatihan, berdasarkan pengalaman penyelenggaraan angkatan pertama ini, agar dapat digunakan pada pelatihan sejenis pada saat berikutnya.

Evaluasi pasca pengembangan kompetensi perlu didesain dilaksanakan terhadap pengembangan kompetensi yang telah dilakukan. Untuk pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan Hutan yang dilaksanakan awal Maret 2023 maka dapat diprogramkan evaluasi pasca pengembangan kompetensi pada triwulan keempat tahun 2023.

VII. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI KE DEPAN

Dengan telah dilakukannya analisis, desain program, pembuatan material, dan pelaksanaan, untuk

beberapa program, maka strategi berikutnya adalah menyelesaikan kurikulum atau pedoman, modul yang belum terselesaikan, melaksanakan yang belum terwujud, dan mereplikasi pelatihan yang telah dicoba dilaksanakan dengan perbaikan seperlunya.

Untuk pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan Hutan, telah tersedia tenaga pengajar ditambah stok 41 tenaga pengajar yang telah dilatih melalui ToT. Hal ini siap untuk menjangkau pembelajaran *blended learning* dengan sebagian program dilaksanakan secara *e-learning* melalui LMS KLHK, dan fase tatap muka dilaksanakan di daerah (pada 7 Balai Pelatihan LHK atau pada 22 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan) yang tersebar di Indonesia. Jadi untuk melatih tenaga pengukuran dan pemetaan sebanyak 655 orang, telah dilatih angkatan pertama 37 orang, BP2SDM telah sangat siap melaksanakan hal tersebut. Tentu dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait (Ditjen PKTL, BPKHTL, Pusdiklat SDM LHK, Balai Pelatihan LHK), dan pihak terkait lainnya.

Pengembangan kompetensi SDM ini bukan hanya dilakukan kepada ASN bidang PKTL di Ditjen PKTL saja, namun ke depan perlu dibekalkan kepada calon rimbawan muda para siswa siswi SMK Kehutanan yang tersebar di Indonesia. Oleh karena itu pada bulan Juni 2023 telah direncanakan untuk melatih para guru SMK Kehutanan terkait kompetensi Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan Hutan. Harapannya setelah kembali dari pelatihan, para guru akan mengajarkan kemampuannya kepada siswa SMK Kehutanan.

VIII. KESIMPULAN

Guna mendukung target pengukuhan kawasan hutan BP2SDM telah berkolaborasi dengan Ditjen PKTL untuk melakukan aksi bersama mengembangkan kompetensi SDM bidang PKTL. Serangkaian langkah mulai menganalisis kebutuhan, mendesain program, mengembangkan material, mengimplementasikan, dan mengevaluasi telah dilaksanakan. Penyelesaian yang masih tertunda, perbaikan yang diperlukan, dan mereplikasi pengalaman pengembangan kompetensi yang dilakukan adalah langkah berikutnya yang dikawal dan dilakukan bersama. Integrasi antara BP2SDM beserta satuan kerjanya dengan Ditjen PKTL dan satuan kerjanya adalah langkah strategis yang terbukti dapat meningkatkan capaian kinerja masing-masing. 🌱

DAFTAR PUSTAKA:

- Branch, R. M. (2009). *Instructional Design: The ADDIE Approach*. Boston: Springer.
- Gamin, G. (2023). *Laporan Penanggung Jawab Akademis Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan Hutan Tahun 2023*. Bogor: Pusat Diklat SDMLHK.
- Ilham. (2021, November 26). *Wamen LHK: Tahun 2023 Penetapan Kawasan Hutan Harus Selesai 100%*. Retrieved from <http://pktl.menlhk.go.id/>: <http://pktl.menlhk.go.id/?pg=h2530q2545k2610a2565o-2620w2525&id=m2445d2460n2440>
- Karo Humas KLHK. (2023, Januari 2). *Potret Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM LHK Tahun 2022*. Retrieved from <https://www.menlhk.go.id/>: https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5208
- Nurhidayati, E. S. (2022). *Hasil Identifikasi Rencana Bangkom Pada Dirjen PKTL (Khusus Tata Lingkungan)*. Bogor.
- Pusdiklat SDM LHK. (2023, Juli 28). *Database Kurikulum*. Bogor, Jawa Barat, Indonesia.
- Pusdiklat SDM LHK. (2023, Agustus 21). *Kursus*. Retrieved from <https://elearning.menlhk.go.id/course/>: <https://elearning.menlhk.go.id/course/>
- Sekditjen PKTL. (2022, Oktober 20). *Peningkatan Kapasitas SDM Mendukung Penetapan Kawasan Hutan dan Tusi Tata Lingkungan. Rapat Pembahasan TOR Diklat Ditjen PKTL Tahun 2023 dan Sertifikasi Keahlian (Identifikasi Kebutuhan Diklat Bidang PKTL dan Sertifikasi, serta Asesmen Center)*. Bogor: Ditjen PKTL.



Fungsi Areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT Alam Bukit Tigapuluh Dalam Konservasi Satwa Liar Mamalia Besar di Provinsi Jambi

Studi Kasus di Kawasan Ekosistem
Esensial Lanskap Bukit Tigapuluh

Oleh:

Waldemar

Widyaiswara Ahli Utama, Pusat Diklat SDM LHK

E-Mail: waldermarhasiholans@gmail.com

ABSTRACT

One of the main causes of population decline and extinction of large mammals in Jambi Province is decreasing habitat quality and habitat fragmentation, therefore the Governor of Jambi Province has attempted to develop management of the Datuk Gedang Wildlife Corridor Essential Ecosystem Area in the Bukit Tigapuluh Nature Landscape, Tebo Regency with the aim of guaranteeing the needs of large mammal wildlife habitat. In its development, the management of the Datuk Gedang Wildlife Corridor Essential Ecosystem Area in the Bukit Tigapuluh Natural Landscape, Tebo Regency has not been effective. Through the study of this case study, a collaborative essential ecosystem area management model that applies the seven principles of modern forest management, is expected to be able to effectively realize the management objectives of Datuk Gedang Wildlife Corridor Essential Ecosystem Area Management in the Bukit Tigapuluh Landscape.

Key word: Essential Ecosystem Area, Wildlife, Population

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman jenis satwa liar yang tinggi, sekurang-kurangnya terdapat 1.600 jenis kupu-kupu, 1.531 jenis burung, 600 jenis reptil, dan 515 jenis mamalia. Sehubungan dengan keadaan ini Indonesia diakui sebagai negara *Megabiodiversity* kedua setelah Brazil (Noerdjito M. dkk, 2001).

Namun demikian keanekaragaman satwa liar tersebut secara umum belum terkelola dengan efektif sehingga populasi satwa liar tersebut cenderung menurun dari tahun ke tahun. Keadaan ini dapat dilihat dari jumlah satwa yang dilindungi terus bertambah. Pada tahun 1931 status satwa liar yang dilindungi di Indonesia berjumlah 33 jenis satwa, selanjutnya pada tahun 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, jumlah satwa liar yang dilindungi bertambah menjadi 236 jenis satwa. Saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 /2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, dinyatakan bahwa jumlah jenis satwa liar yang dilindungi di Indonesia bertambah menjadi 787 jenis. Dengan demikian

dalam kurun waktu 87 tahun jumlah jenis satwa liar yang populasinya terus menurun sampai pada batas mengkhawatirkan sehingga satwa liar yang dilindungi bertambah sebanyak 754 jenis.

Salah satu penyebab utama terjadinya penurunan populasi dan kepunahan satwa liar mamalia besar termasuk harimau, badak, gajah dan orangutan adalah akibat menurunnya kualitas habitat dan terjadinya fragmentasi habitat. Keadaan ini pun telah terjadi di Provinsi Jambi termasuk di Areal Hutan yang berada di Kabupaten Tebo sehingga telah menyebabkan satwa liar harimau, gajah dan orang utan berada dalam kondisi yang tertekan dan menjadi sumber konflik antara satwa liar dengan masyarakat yang bermukim di sekitar Kawasan hutan.

Oleh karena kondisi hutan yang juga berfungsi sebagai habitat utama harimau, gajah dan orang utan di Kabupaten Tebo sudah dalam keadaan terfragmentasi maka kebutuhan habitat satwa liar harimau, gajah dan orang utan yang cukup luas dapat dipenuhi dengan menggunakan berbagai status kawasan yang dikelola dalam satu kesatuan ekosistem dan lanskap. Salah satu upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan habitat harimau, gajah dan orang utan dalam satu kesatuan pengelolaan, maka Pemerintah Provinsi Jambi melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 telah menetapkan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo.

Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh ini memiliki luas 61.829,12 ha, yang terdiri atas Hutan Produksi seluas 45.711, 75 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 15.979,12 dan Areal Penggunaan Lain seluas 138, 25 ha. Sebagian besar Kawasan hutan produksi yang termasuk di dalam Kawasan Ekosistem Esensial pada lanskap Bukit Tigapuluh ini dikelola oleh Pemegang Ijin Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh dengan tujuan restorasi ekosistem dan Pemegang Izin Berusaha Kehutanan untuk pengembangan Hutan Tanaman Industri. Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo dikelola secara kolaboratif oleh para pihak terkait di bawah koordinasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

B. Permasalahan

Kawasan Ekosistem Esensial yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Peraturan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo seluas 61.829,12 ha, terdiri atas berbagai status dan fungsi Kawasan yang dikelola oleh masing-masing pihak dengan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu diketahui fungsi masing-masing areal penyusun kawasan ekosistem esensial tersebut, khususnya fungsi utama Kawasan Hutan Produksi yang dikelola oleh Pemegang Perijinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh dalam mencapai tujuan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh.

Demikian pula untuk mencapai tujuan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Tebo, model pengelolaan kawasan yang bagaimanakah yang dapat mencapai tujuan pengelolaan yang efektif?

C. Tujuan Kajian

Kajian ilmiah terhadap fungsi Areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh dalam konservasi satwa liar mamalia besar di Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh, bertujuan untuk mengetahui fungsi utama Areal

Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh dalam mencapai tujuan konservasi satwa liar mamalia besar di Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh serta untuk mendapatkan model pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh yang efektif.

II. METODE DAN WAKTU KAJIAN

A. Metode Kajian

1. Metode yang digunakan dalam kajian ilmiah ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:
 - a. Mempelajari referensi dan pengetahuan yang terkait dengan pengembangan kawasan ekosistem esensial;
 - b. Melakukan observasi lapangan di Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh
 - c. Melakukan pengumpulan data primer dan sekunder terkait kondisi habitat satwa liar di Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh
2. Analisis Data
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis deskriptif terhadap peran masing-masing kawasan penyusun Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh, khususnya peran Areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT Alam Bukit Tigapuluh.

B. Waktu dan Tempat

1. Waktu kajian terhadap fungsi areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh yang termasuk dalam Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2022-2023.
2. Lokasi Kajian dilaksanakan di Kantor BKSDA Jambi, Kantor PT. Alam Bukit Tigapuluh di Jambi dan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh di Kabupaten Tebo.

III. KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LANSKAP BUKIT TIGAPULUH

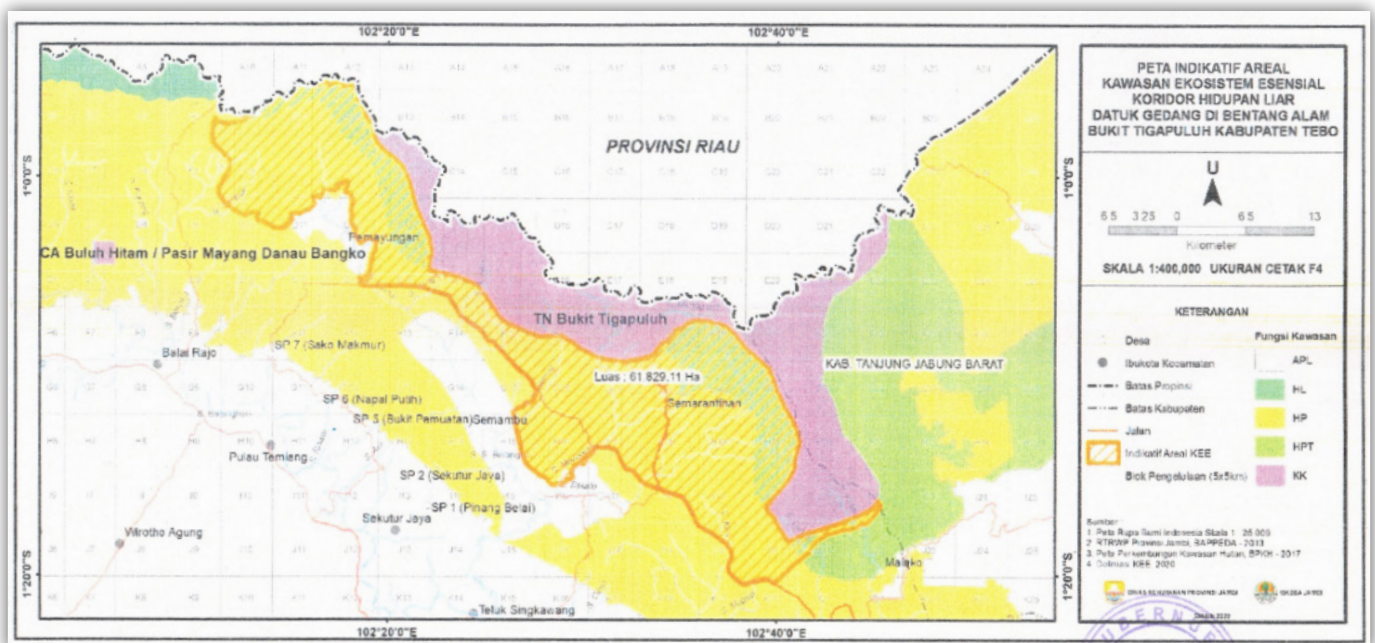
A. Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022. Kawasan Ekosistem Esensial ini memiliki luas 61.829,12 ha, yang terdiri atas Hutan Produksi seluas 45.711, 75 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 15.979,12 dan Areal Penggunaan Lain seluas 138, 25 ha

Batas-Batas Kawasan Ekosistem Esensial Lanskap Bukit Tigapuluh di Kabupaten Tebo, terdiri

Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh, adalah:

1. menjamin keberadaan ekosistem esensial hidupan liar dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. mengoptimalkan fungsi ekosistem esensial hidupan liar yang meliputi fungsi lindung, fungsi pengawetan, fungsi pemanfaatan, fungsi sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang dan lestari; dan
3. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial, ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal untuk menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Gambar 1. Kawasan Ekosistem Esensial Lanskap Bukit Tigapuluh di Kabupaten Tebo

atas: sebelah utara berbatasan dengan Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, sebelah Timur berbatasan dengan Areal HTI PT LAJ, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain.

Secara administrasi Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Tebo terletak di Kecamatan Batang Sumai dan Kecamatan Tebo Tengah Ilir, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Adapun tujuan ditetapkannya Kawasan Ekosistem

B. Areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh

PT. Alam Bukit Tigapuluh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 7/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015 tanggal 24 Juli 2015 telah mendapatkan IUPHHK-Restorasi Ekosistem atas areal hutan seluas 38.665 ha, yang terletak di Kabupaten Tebo. Areal konsesi PT. ABT seluas ± 38.665 Ha terdiri dari 2 blok, Blok I Suo Suo dan Blok II Pemayungan, merupakan penyangga (*buffer zone*) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang memiliki flora dan fauna dengan

Tabel 1. Struktur Organisasi Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh

No.	Jabatan	Institusi
1	Pelindung	1. Gubernur Provinsi Jambi 2. Direktur Jenderal KSDAE, Kementerian LHK
2	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi 2. Bupati Tebo 3. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 4. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian LHK
3	Ketua	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
4	Wakil Ketua	1. Kepala Bappeda Provinsi Jambi 2. Kepala Balitbangda Kabupaten Tebo 3. Kepala Balai TN Bukit Tigapuluh
5	Sekretaris	1. Kepala Balai KSDA Jambi 2. Kepala KPHP Tebo Timur
6	Anggota	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 4. Kepala BPDAS HL Batanghari Jambi 5. Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera 6. Kepala KPHP Tebo Barat 7. Kepala Dinas PUPR Tebo 8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tebo 9. Kepala Dinas Perindag dan Naker Kabupaten Tebo 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo 11. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo 12. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi 13. Kepala Bagian SDA Setda Tebo 14. Camat Sumay 15. Camat Tengah Ilir 16. Kepala Desa Muara Kilis 17. Kepala Desa Suo-suo 18. Kepala Desa Muara Sekalo 19. Kepala Desa Semambu 20. Kepala Desa Pelayungan 21. Kepala Desa Semerantihan 22. PT. Alam Lestari Jaya (LAJ) 23. PT. Alam Bukit Tigapuluh (ABT) 24. PT. Tebo Alam Lestari (TAL) 25. PT. Wirakarya Sakti (WKS) 26. Frankfurt Zoological Society (FZS) 27. Yayasan Konservasi Satwa Liar Indonesia (YKSLI) 28. Koperasi Sepenat Alam Lestari Desa Muara Kilis 29. Koperasi Setia Jaya Mandiri Desa Suo-suo 30. Koperasi Bungo Pandan Desa Suo-suo

Tujuan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, adalah:

1. terwujudnya kawasan ekosistem esensial hidupan liar dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. meningkatnya fungsi ekosistem esensial hidupan liar yang meliputi fungsi lindung, fungsi pengawetan, fungsi pemanfaatan, fungsi sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang dan lestari; dan
3. meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial, ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal untuk menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Adapun sasaran pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, adalah:

1. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Para Pihak dalam membangun dan menjaga keseimbangan ekologi, sosial, ekonomi dan budaya di dalam Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh;
2. meningkatkan peran Para Pihak dalam perlindungan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi perlindungan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh yang dilakukan Para Pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; dan
4. meningkatkan kerjasama Para Pihak dalam perlindungan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh.

Secara umum Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh mempunyai tugas untuk: 1) mengusulkan areal pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, 2)

menyusun rencana aksi/rencana kerja terkait pengelolaan Kawasan ekosistem esensial, 3) memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya pengelola kawasan, 4) melaksanakan monitoring kawasan ekosistem dan evaluasi rencana aksi/rencana kerja pengelolaan kawasan ekosistem esensial, 5) menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial, 6) melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur Jambi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

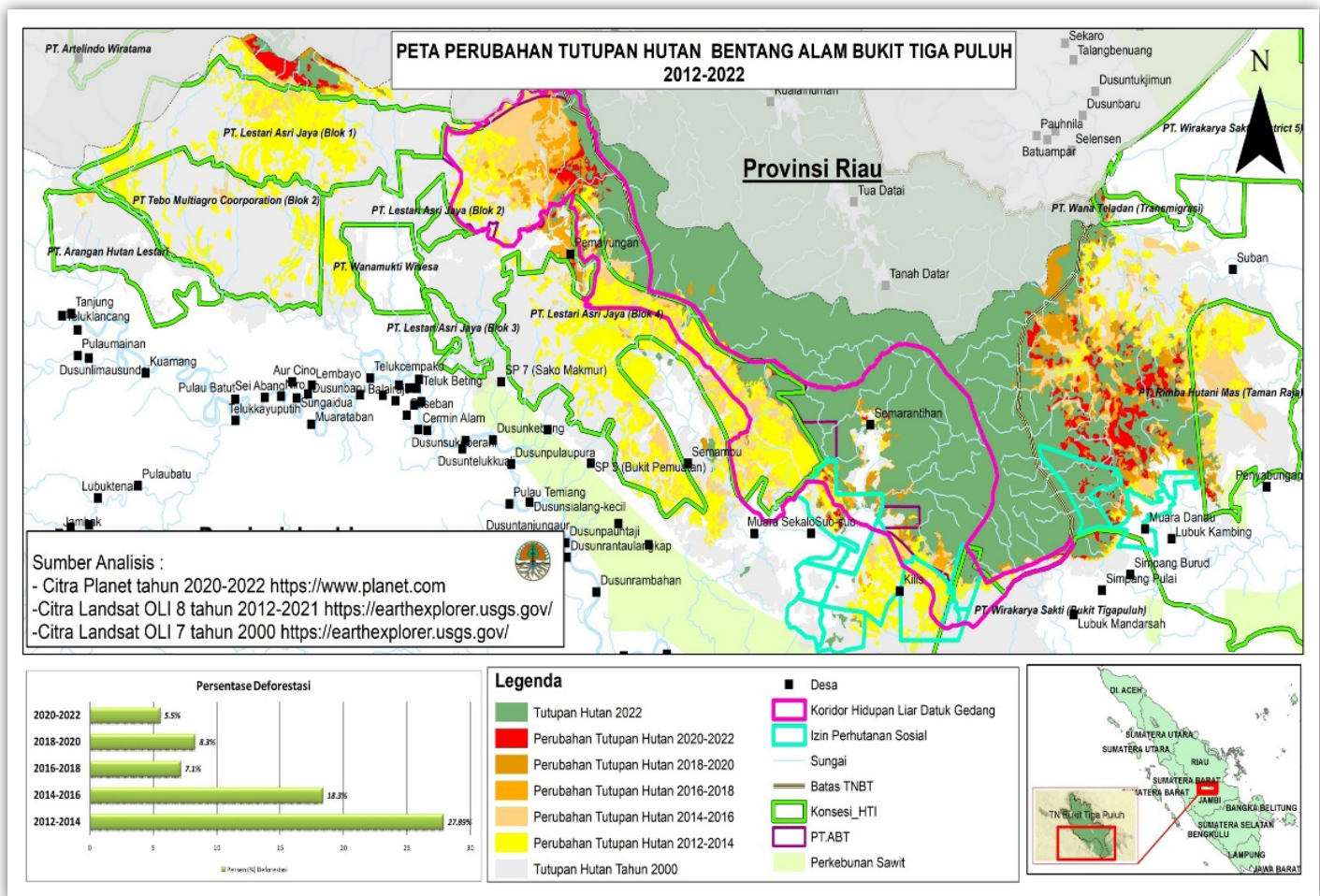
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Habitat Satwa Liar Di Kawasan Ekosistem Esensial

Secara umum Kawasan Ekosistem Esensial pada lanskap Bukit Tigapuluh mengalami gangguan yang cukup berat dari aktivitas ilegal, seperti: pendudukan kawasan tanpa izin, perambahan kawasan untuk pertanian dan perkebunan tanpa izin, pembalakan liar dan pembukaan lahan dengan pembakaran. Lebih dari 10.000 ha hutan yang juga berfungsi sebagai habitat satwa liar di Kawasan Ekosistem Esensial mengalami degradasi berat dan beralih fungsi sebagai kebun sawit, perladangan dan pemukiman. Keadaan ini selain ditemukan pada saat observasi juga dikuatkan dengan Peta Perubahan Tutupan Lahan Bentang Alam Bukit Tigapuluh Tahun 2012-2022, sebagaimana disajikan dalam Gambar 3.

Kondisi hutan dan tutupan hutan di Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh yang masih baik sebagian besar hanya terdapat di Areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh. Dengan jenis usaha kehutanan restorasi ekosistem, tentunya areal perizinan berusaha kehutanan ini memiliki kemampuan lebih besar dalam mewujudkan tujuan ditetapkannya Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh.

Selain itu Areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh, yang menjadi salah satu lokasi rehabilitasi dan reintroduksi satwa liar telah menunjukkan keberhasilannya. Sudah banyak orang utan hasil sitaan, rampasan dan peliharaan yang



Gambar 3. Kondisi Perubahan Tutupan Hutan

diserahkan masyarakat yang dilakukan rehabilitasi dan dilepasliarkan di Areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh telah berhasil hidup secara alami bahkan telah berhasil berkembang biak.

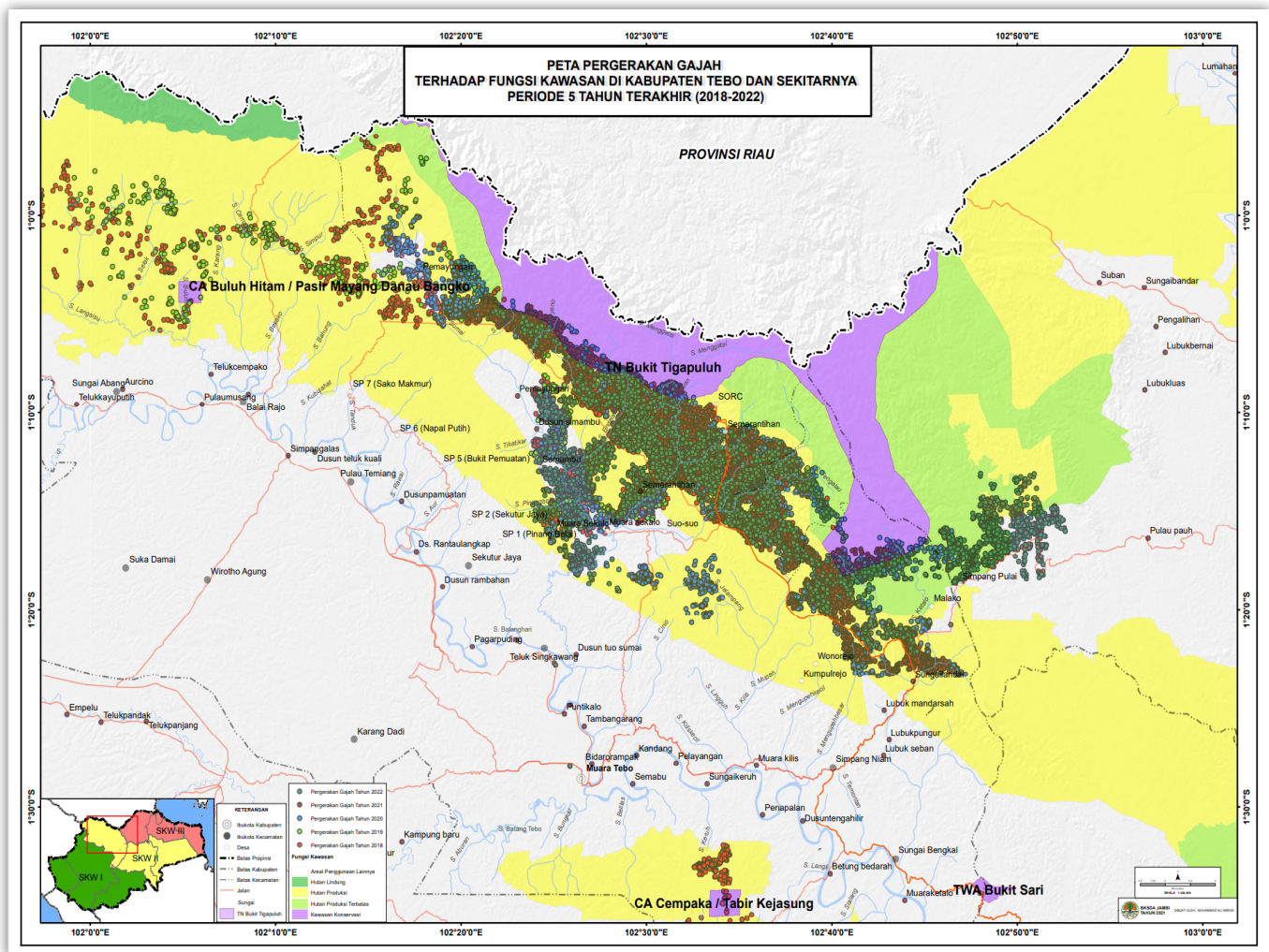
Demikian juga harimau Sumatera (*Panthera tigris sumaterae*) banyak ditemukan di kawasan ini. Ditinjau dari mobilitas satwa liar dan tatanan ruang Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh, maka Areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh selain sebagai pusat habitat satwa liar mamalia besar, juga berfungsi sebagai koridor satwa liar mamalia besar yang menghubungkan habitat gajah di Wilayah Tanjung Jabung Barat dengan habitat gajah yang berada di Wilayah Tebo. Selain itu Areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh merupakan perluasan habitat bagi satwa liar yang berada di Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

B. Keberadaan Satwa Liar Mamalia Besar

Sebagai akibat terganggunya dan terfragmentasinya habitat satwa liar mamalia besar seperti gajah Sumatera (*Elephas maximus*) telah menyebabkan populasi gajah yang biasanya dalam kelompok besar menjadi terpecah dalam kelompok-kelompok kecil. Demikian pula pergerakannya menjadi sangat terbatas dan cenderung tidak bergerak jauh.

Keberadaan dan sebaran satwa liar gajah, harimau dan orang utan di Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh cenderung lebih banyak ditemukan dan terkonsentrasi di Areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh.

Dengan demikian Areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh sangat penting bagi habitat dan konservasi satwa liar khususnya bagi satwa liar harimau, gajah dan orang utan karena di areal ini masih memiliki tutupan



Gambar 4. Pergerakan Gajah Di Kawasan Ekosistem Esensial

hutan yang cukup dengan spesies tumbuhan dan satwa mangsa yang menjadi sumber pakannya. Keberadaan dan pergerakan satwa liar gajah di Kawasan Ekosistem Esensial dapat dilihat pada Gambar 4.

C. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial secara faktual di Lapangan masih dilaksanakan oleh masing-masing pihak secara sendiri-sendiri dan belum dalam kesatuan manajemen kolaborasi untuk mewujudkan tujuan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Forum Kolaborasi Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 177/KEP.GUB/ DISHUT-33/2020 Tanggal 19 Februari 2020, belum berjalan efektif.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 177/KEP.GUB/ DISHUT-33/2020 Tanggal 19 Februari 2020 dan pada kondisi Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh serta para pihak yang terlibat dalam pengelolaannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan, sebaiknya pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh dilaksanakan secara kolaboratif yang melibatkan para pihak terkait, dengan menerapkan tujuh prinsip pengelolaan hutan modern (Waldemar. 1995) yaitu:

1. Pengelolaan KEE Datuk Gedang haruslah berbasis pada Lanskap dan Ekosistem;
2. Pengelolaan KEE Datuk Gedang haruslah berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengelolaan KEE Datuk Gedang sosial dan budaya;

4. Pengelolaan KEE Datuk Gedang haruslah berbasis multifungsi dan multiproduksi;
5. Pengelolaan KEE Datuk Gedang haruslah berbasis multipihak yang antara lain: unsur pemerintah pusat dan daerah, unsur akademisi, unsur pelaku usaha, unsur masyarakat dan unsur media;
6. Pengelolaan KEE Datuk Gedang haruslah berbasis tapak;
7. Pengelolaan KEE Datuk Gedang haruslah berbasis penegakan hukum.

V. KESIMPULAN

Kawasan hutan pada areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh merupakan habitat dan pusat konsentrasi satwa liar mamalia besar jenis harimau, gajah dan orang utan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh. Areal perizinan ini juga berfungsi sebagai koridor satwa liar mamalia besar yang menghubungkan habitat gajah di Wilayah Tanjung Jabung Barat dan juga berfungsi sebagai perluasan habitat satwa liar yang hidup di Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Akibat luasnya gangguan hutan dan terdegradasinya habitat satwa liar di Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit menyebabkan satwa liar cenderung diketemukan dan terkonsentrasi di Areal Perizinan Berusaha Kehutanan PT. Alam Bukit Tigapuluh yang kondisi hutannya masih cukup baik dan luas. Oleh karena itu upaya penyelamatan dan perlindungan habitat dan satwa liar yang hidup di kawasan ini menjadi prioritas utama.

Dengan tetap mempertimbangkan Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 177/KEP.GUB/DISHUT-33/2020 Tanggal 19 Februari 2020 , untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh maka model pengelolaan yang perlu diterapkan adalah Model Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Secara Kolaboratif yang menerapkan 7 Prinsip Pengelolaan Hutan Modern. 

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2015). Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 7/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Pemberian IUPHHK-Restorasi Ekosistem seluas 38.665 ha, yang terletak di Kabupaten Tebo kepada PT. Alam Bukit Tigapuluh. Jakarta
- Pemerintah Provinsi Jambi. (2020). Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 177/KEP.GUB/DISHUT-33/2020 Tanggal 19 Februari 2020 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Jambi.
- Pemerintah Provinsi Jambi. (2022). Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang Di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Tebo.
- Waldemar, H. (2016). Efektivitas Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Masyarakat. Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bogor

Profil Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Sebagai Acuan Untuk Mewujudkan Sumberdaya Manusia Tingkat Terampil yang Unggul



Oleh:

Agus Wiyanto

Widyaiswara Ahli Utama, Pusat Diklat SDM LHK

E-Mail: dewijanto@yahoo.com

ABSTRACT

The development objectives of the implementing forestry vocational high schools in line with the policy of the Ministry of Environment and Forestry which is to provide forestry intermediate technical personnel in high or intermediate skills category who are able and willing to work at the site level in a competent and professional manner. Profile of Forestry Vocational High School Graduates is a formulation which is a figure of human resources that will be produced after completion/graduation of forestry vocational high schools, in the form of forestry vocational high school as technical personnel in the category of high or intermediate skills who are able and willing to work at the site level competently and professionally. The profile of Forestry Vocational High School Graduates can be used as a reference for policy makers, planners, implementers and evaluators in organizing forestry vocational high schools. Implementation of the Implementation of Forestry Vocational High School to Realize the Graduate Profile of State Forestry Vocational Schools brings the consequence of the need to strengthen and develop Forestry Middle Schools (SMK); development of national curricula and learning to support the realization of the objectives of providing superior state forestry vocational high school; improvement of facilities, infrastructure, materials and equipment for the implementation of forestry vocational high school and the development of cooperation with the Industry and the world of work in the forestry and environment sector.

Key words: forestry vocational high school, graduation profile, high level skills, intermediate level skills, work at site level, industry, world of work.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu misi Indonesia maju adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Misi Indonesia maju lainnya antara lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk mendukung misi Indonesia Maju yakni peningkatan kualitas manusia Indonesia dan untuk menyelaraskan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan lingkungan hidup dan kehutanan; Badan penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2SDM KLHK) dan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusdiklat SDM LHK) perlu merevitalisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan kehutanan.

Sebagai dasar Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam

menyelenggarakan sekolah menengah kejuruan kehutanan (SMK Kehutanan) adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan menengah kehutanan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia KLHK (BP2SDM KLHK) sebagai salah satu unit instansi setingkat eselon I di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki salah satu tugas yaitu melakukan pembinaan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan dengan salah satu tugasnya yaitu menyiapkan bahan penyelenggaraan pengakuan lembaga pendidikan dan pelatihan

lingkungan hidup dan kehutanan serta pengakuan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan.

Tujuan dari Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan menurut Peraturan Menteri LHK Nomor 42 tahun 2016 adalah membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila serta berkarakter 9 (sembilan) nilai dasar peserta didik yaitu jujur, tanggung jawab, akuntabel (tanggung gugat), ikhlas, disiplin, visioner, adil, peduli, kerja sama, profesional, dan berciri kenegarawan. Tujuan lainnya adalah menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, responsif, demokratis, dan menjadi motor penggerak pembangunan kehutanan di lapangan dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat serta memiliki daya saing tingkat nasional maupun internasional.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SMK Kehutanan yang sudah diundangkan yang masih perlu direvisi antara lain perlu memasukkan pasal permagangan; rekrutmen peserta didik melalui jalur khusus; profil alumni; penyesuaian kurikulum dan pembelajaran; tata kelola penyelenggaraan SMK Kehutanan/pembentukan tenaga terampil bidang lingkungan hidup dan kehutanan; pengembangan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Agar tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah di bidang kehutanan dapat tercapai maka perlu ada panduan/acuan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan. Acuan tersebut dapat berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat pasal-pasal tentang perumusan profil lulusan SMK Kehutanan.

Profil Lulusan SMK Kehutanan dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan, perencana, pelaksana maupun evaluator dalam menyelenggarakan pendidikan menengah kehutanan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya berbagai pertanyaan yang timbul antara lain bagaimana memasukan profil lulusan SMK Kehutanan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan serta bagaimana memotivasi dan memperoleh dukungan semua pihak khususnya para kepala sekolah/wakil kepala sekolah, guru-guru SMK Kehutanan, pembina siswa, dan tenaga kependidikan lainnya agar dalam melaksanakan tugas pelaksanaan pendidikan SMK kehutanan dapat mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang sesuai dengan profil lulusan SMK Kehutanan. Masalah lain adalah bagaimana mendorong pembuat kebijakan untuk membuat peraturan yang dapat memayungi dan berkomitmen dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan untuk mewujudkan SDM yang sesuai dengan profil lulusan SMK Kehutanan. Dalam hal ini dapat memberikan dukungan dan komitmen pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas pelaksanaan pendidikan menengah kehutanan dan pendanaan penyelenggaraan SMK Kehutanan yang memadai.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan informasi tentang profil lulusan SMK Kehutanan bagi para pihak penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan dan implikasinya. Manfaat tulisan ini sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan agar dapat bersemangat, termotivasi dan bersinergi untuk menghasilkan tenaga teknis menengah yang unggul, mampu dan mau bekerja di tingkat tapak bidang kehutanan dan lingkungan hidup secara kompeten dan profesional.

II. METODE

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan pengamatan serta gagasan penulis, kemudian dibangun analisis dan sintesis dari berbagai data dan informasi yang didapat. Berdasarkan analisis data tentang penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan dibangun karya tulis ilmiah ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lulusan SMK Kehutanan Negeri Untuk Memenuhi Tenaga Kerja Dengan Keahlian Tinggi dan Keahlian Menengah Teknis Kehutanan

BAPPENAS (2023) menyatakan bahwa Indonesia memiliki tantangan besar untuk meningkatkan kualitas Angkatan Kerja yang saat ini sebagian besar masih berkeahlian rendah dan berpendidikan SMP ke bawah. Ini menjadi salah satu faktor sebagian besar Angkatan Kerja masih bekerja pada sektor informal.

Untuk mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045, tantangan yang dihadapi antara lain kualitas angkatan kerja yang masih rendah. Strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan harus memperhatikan:

1. Investasi SDM penduduk usia muda untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkeahlian dan produktif dengan masa kerja yang lebih panjang. Angkatan kerja yang Tangguh, Inovatif, Adaptif, Kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal. Tantangan lainnya adalah penciptaan sekurang-kurangnya 198,3 juta lapangan pekerjaan produktif pada Tahun 2045. Lapangan kerja bergeser ke arah informal dan kemunculan bentuk kerja baru (*gig worker*) yang bersifat sangat fleksibel. Pasar kerja semakin tidak pasti karena percepatan perubahan di dunia industri dan dunia usaha semakin cepat. Pasar kerja Indonesia belum fleksibel mengikuti perubahan lapangan kerja yang cepat.
2. Rendahnya jumlah tenaga kerja dengan keahlian tinggi (*high-skilled*) dan menengah (*semi-skilled*) yang sepadan dengan kebutuhan pasar kerja merupakan tantangan lainnya.
3. Sistem pengembangan keahlian (*skills development system*) kita masih parsial dan belum berbasis kebutuhan pasar kerja terutama akibat belum adanya sistem informasi pasar kerja terintegrasi sebagai intelijen pasar kerja.

Sekarang ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa kondisi anak muda atau generasi muda sekarang merupakan *useless generation* atau generasi yang kurang berguna,

karena mencari kerja susah, membuka usaha juga susah. Pendidikan masih abu-abu belum jelas karena pelaksanaan pendidikan belum mengakomodir kebutuhan dunia usaha/dunia kerja maupun dunia industri. Oleh karena generasi muda saat ini bekalnya kurang cukup memperoleh keahlian dari pendidikan yang telah diikuti, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Untuk memperoleh keahlian atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri masih perlu mengikuti beberapa pelatihan atau kursus dari berbagai lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan. Apalagi dengan kemajuan teknologi *Artificial Intelligent (AI)* /kecerdasan buatan yang cepat, maka akan banyak pekerjaan atau profesi yang semula dilakukan oleh manusia akan digantikan dengan mesin dengan penerapan aplikasi tertentu. Dunia industri dan dunia usaha berkembang lebih cepat dibanding dengan perkembangan pendidikan maupun pelatihan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan dengan mesin-mesin. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional diharapkan tahun 2021-2024 diharapkan akan tercipta 1 juta wirausaha baru. Rasio kewirausahaan Indonesia masih rendah dibanding dengan negara-negara lain. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah melalui dunia pendidikan harus dapat mencetak lulusan yang memiliki pola pikir untuk membangun kewirausahaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi adalah untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja/berusaha dalam bidang tertentu. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan kejuruan kehutanan (SMK Kehutanan) adalah untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja/berusaha dalam bidang kehutanan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya mengurus bidang kehutanan saja, tetapi mengurus juga bidang lingkungan hidup, sehingga penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan perlu memasukkan keahlian-keahlian atau materi tentang lingkungan hidup dan kehutanan.

Saat ini banyak lembaga pendidikan dan pelatihan maupun perguruan tinggi (universitas)

membuka pendidikan vokasi mulai dari tingkat pendidikan sarjana strata satu (S1) hingga sarjana starta tiga (S3). Dalam pendidikan vokasi, kurikulum dan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan kerja di dunia industri dan dunia usaha. Hal ini ditempuh agar lulusan perguruan tinggi sudah siap kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Perlu diketahui bahwa lingkungan baik lokal maupun global sesungguhnya selalu bergerak, berubah, dan membawa pengaruh yang sangat besar bagi lembaga pendidikan. Diketahui pula bahwa dalam dunia pendidikan sekarang ini juga semakin kompetitif, mereka berlomba-lomba untuk mencapai mutu yang terbaik, sehingga bagi lembaga pendidikan yang biasa-biasa saja dan stagnan (menutup diri) kemungkinan besar akan terseleksi secara alami. Hal ini telah nampak pada beberapa lembaga sekolah yang kian hari siswanya kian mengalami penurunan secara drastis, bahkan sekolah harus menggembornggemborkan iming-iming gratis, untuk menarik minat siswa agar tertarik menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Perubahan inilah yang seharusnya diantisipasi oleh lembaga pendidikan dengan mempersiapkan strategi yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kinerja lembaganya, sehingga diharapkan sebuah lembaga mampu mempertahankan eksistensi dan mampu meningkatkan daya saingnya. Pandangan baru yang seharusnya dipahami adalah bahwa kompetisi/persaingan bukan merupakan alasan untuk tidak melakukan kerjasama. Dengan jiwa kompetisi, lembaga pendidikan akan senantiasa berupaya untuk mengembangkan diri ke arah yang jauh lebih baik. Begitu pula melalui kerjasama, sebuah lembaga pendidikan bahkan mampu memperkuat dirinya dalam meningkatkan daya saing dengan menerapkan secara efektif mata pelajaran-mata pelajaran yang telah dipelajari secara susah payah oleh lembaga-lembaga lain yang telah menghadapi situasi-situasi serupa atau masalah-masalah terkait (Fitriana, 2014)

Tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah di bidang kehutanan dapat tercapai maka perlu ada panduan/acuan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan. Acuan tersebut dapat berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat pasal-pasal tentang perumusan profil lulusan SMK Kehutanan.

Profil Lulusan SMK Kehutanan dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan, perencana, pelaksana maupun evaluator dalam menyelenggarakan pendidikan menengah kehutanan.

Profil Lulusan SMK Kehutanan Negeri telah diinisiasi oleh Pak Ramlan (Kepala Sekolah SMK Kehutanan Negeri Samarinda tahun 2022). Profil Lulusan SMK Kehutanan Negeri yang digagas oleh Pak Ramlan diadopsi dari Profil Profesional Mandiri Prodi S1 Universitas Andalas. Draft Profil Lulusan SMK Kehutanan Negeri telah mengalami beberapa kali pembahasan baik oleh para Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah, Guru-Guru SMK Kehutanan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tim Kerja Pendidikan Menengah pada Pusat Diklat SDM LHK maupun melalui workshop yang dihadiri oleh pihak pengguna lulusan SMK Kehutanan antara lain pejabat eselon I Lingkup kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kehutanan, Asosiasi pengusaha bidang kehutanan (APHI), Perusahaan Swasta bidang kehutanan dan lain sebagainya.

Profil lulusan SMK Kehutanan Negeri KLHK mencakup visi dan misi; profil lulusan terdiri dari profil bekerja, profil wirausaha dan profil melanjutkan pendidikan beserta uraian profil lulusan serta capaian lulusan yang meliputi kompetensi *hard skill* dan *soft skill* untuk setiap profil lulusan. Profil lulusan SMK Kehutanan negeri KLHK juga mencakup capaian pembelajaran dan pembinaan meliputi capaian pembelajaran aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek sikap serta capaian pembinaan fisik dan mental.

Muatan yang terdapat dalam profil lulusan SMK Kehutanan Negeri KLHK sesuai dengan pengembangan tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah menyediakan tenaga teknis menengah kehutanan kategori keterampilan unggul yang mampu dan mau bekerja di tingkat tapak secara kompeten dan profesional.

Sesuai tujuan pendidikan di atas, lulusan SMK Kehutanan Negeri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga teknis bidang kehutanan di instansi pemerintah (pusat dan pemerintah daerah), dunia industri dan dunia usaha dan

mampu melakukan kegiatan wirausaha. Lulusan SMK Kehutanan memiliki peran penting, utamanya sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program-program pembangunan kehutanan untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Penyempurnaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelenggaraan SMK Kehutanan dalam rangka merevitalisasi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan.

Agar profil lulusan SMK Kehutanan ini dapat terlaksana maka diperlukan payung hukum, berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang hingga saat ini masih dalam proses pembuatannya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini seharusnya mencakup pengaturan tentang permagangan lulusan SMK Kehutanan, rekrutmen atau penerimaan peserta didik baru (PPDB); profil lulusan SMK Kehutanan. Mencermati profil lulusan SMK Kehutanan Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan adalah terutama untuk bekerja di bidang kehutanan dan lingkungan hidup atau berwirausaha di bidang kehutanan dan lingkungan hidup atau melanjutkan ke pendidikan tinggi dalam rangka pengembangan diri dan peningkatan profesionalismenya.

Permagangan lulusan SMK Kehutanan ini merupakan pemanfaatan alumni SMK Kehutanan untuk bekerja di kegiatan-kegiatan kehutanan khususnya di lokasi tapak. Hal ini karena pembiayaan SMK Kehutanan berasal dari dana Pemerintah, sehingga sudah selayaknya ada kewajiban bagi alumni lulusan SMK Kehutanan untuk mengabdikan kepada Pemerintah untuk kurun waktu tertentu. Setelah alumni memenuhi kewajiban melakukan magang di kegiatan-kegiatan bidang kehutanan, selanjutnya alumni SMK Kehutanan dapat bekerja di sektor swasta kehutanan, berwirausaha maupun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Rekrutmen peserta pendidikan SMK Kehutanan perlu memasukan rekrutmen melalui jalur khusus, yakni anak-anak dari orang tuanya yang bekerja sebagai petani hutan, karyawan KLHK yang bekerja di tingkat tapak, dan lain-lain.



Gambar 1. Poster Pameran SMK Kehutanan Negeri, Badan P2SDM KLHK 2023

B. Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Menengah Kehutanan Untuk Mewujudkan SDM Kehutanan sesuai dengan Profil Lulusan SMK Kehutanan Negeri.

Penyelenggaraan SMK Kehutanan untuk mengisi jabatan terampil di tingkat tapak. Untuk mewujudkan sumberdaya manusia seperti yang telah dirumuskan dalam profil lulusan SMK Kehutanan akan membawa konsekuensi perlu adanya kebijakan yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan SMK Kehutanan, penyempurnaan pelaksanaan pendidikan SMK Kehutanan, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan (guru-guru, Kepala dan Wakil Kepala Sekolah, Pembina Siswa, tenaga administrasi, dan lain-lain), agar dapat menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan yang dapat menghasilkan SDM seperti apa yang telah dirumuskan dalam profil lulusan SMK kehutanan. Oleh karenanya perlu penyempurnaan Peraturan Menteri LHK tentang penyelenggaraan SMK Kehutanan yang memuat profil lulusan SMK Kehutanan,

peningkatan kapasitas dan sertifikasi bagi tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan lainnya. Selain itu perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SMK Kehutanan dan pengelolaan tenaga terampil bidang lingkungan hidup dan kehutanan berbasis teknologi informasi.

Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Menengah Kehutanan Untuk Mewujudkan Profil Lulusan SMK Kehutanan Negeri membawa konsekuensi.

1. Melakukan penguatan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. Penguatan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan diperlukan karena lembaga pendidikan ini sebagai rumah atau wadah yang efektif untuk menyelenggarakan pendidikan menengah kehutanan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan SDM KLHK yang sesuai dengan profil lulusan SMK Kehutanan.
2. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan negeri yang unggul, pengembangan bahan ajar/modul/buku pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan menengah kejuruan kehutanan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat ditambah dengan pembelajaran umum (*stadium generale*) yang diberikan oleh para pejabat struktural dari eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama eselon I yang akan menerima lulusan SMK Kehutanan. Untuk pengayaan pengetahuan dan wawasan siswa, penyelenggara pendidikan dapat mengundang narasumber maupun praktisi untuk memberikan materi yang dibutuhkan dunia kerja. Bagi PPDB melalui jalur khusus dapat diberikan pembelajaran tambahan di malam hari agar pengetahuan dan keterampilannya setara dengan PPDB dari jalur regular. Untuk menjaga konsistensi dan fokus pembelajaran, peserta didik wajib tinggal di asrama. Pola didik di asrama ditekankan kepada pendekatan religius dan kekeluargaan sehingga antar peserta didik maupun dengan pembina tercipta lingkungan yang nyaman dan minim pelanggaran. Untuk

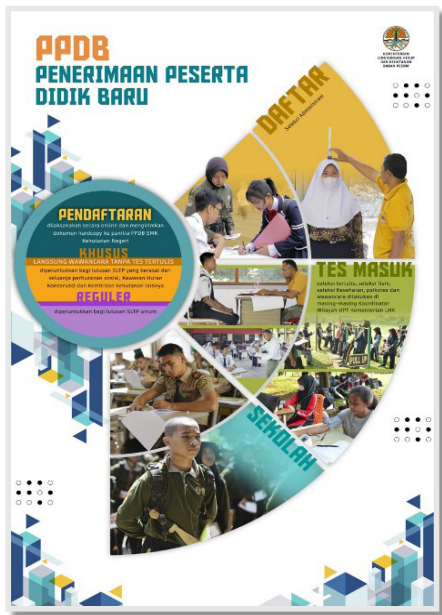
mendorong peningkatan pembelajaran dan peningkatan kompetensi SDM LHK perlu mengadopsi pendekatan religius dan kekeluargaan di lingkungan pendidikan SMK Kehutanan sehingga tercipta suasana kehidupan asrama yang nyaman dan sehat.



Gambar 2. Poster Pameran SMK Kehutanan Negeri, Badan P2SDM KLHK 2023

3. Penyempurnaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk memperoleh calon siswa yang berpotensi untuk menjadi lulusan sesuai dengan profil lulusan SMK Kehutanan. Memastikan memperoleh calon peserta didik terbaik dengan melakukan seleksi penerimaan peserta didik baru secara transparan, bertahap dan tanpa adanya intervensi dalam penerimaan PPDB. SMK Kehutanan Negeri telah melakukan penerimaan peserta didik baru melalui jalur khusus. Calon peserta didik baru melalui jalur khusus berasal dari anak-anak Kelompok Tani Hutan atau anak dari pegawai KLHK yang bekerja di tingkat tapak atau kawasan hutan. Hal ini agar lulusan SMK Kehutanan dari jalur khusus tersebut mampu dan mau bekerja di tingkat tapak sebagai tenaga terampil kehutanan.

4. Peningkatan kapasitas dan perubahan pola pikir guru-guru dan kepala sekolah/wakil kepala sekolah, para Pembina siswa. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pendidik dan kependidikan lainnya untuk meningkatkan kompetensi dan perubahan pola pikir, memfasilitasi sertifikasi teknis dan profesi bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada SMK Kehutanan negeri.



Gambar 3. Poster Pameran SMK Kehutanan Negeri, Badan P2SDM KLHK 2023

5. Peningkatan kapasitas dan perubahan pola pikir tenaga kependidikan lainnya, seperti tenaga administrasi. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga administrasi agar memiliki pola pikir dan komitmen yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan SMK Kehutanan untuk menghasilkan SDM unggul.
6. Peningkatan fasilitas, sarana, prasarana, bahan dan peralatan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan., dalam rangka:
 - o Menyediakan fasilitas dan layanan baik dalam pembelajaran maupun di asrama yang memberikan kenyamanan, kesehatan dan keamanan bagi peserta didik.
 - o Memberdayakan penuh Bimbingan Konseling (BK) untuk selalu memperbarui informasi kampus, kompetensi lulusan SMK Kehutanan maupun hal penting lainnya terkait tujuan peserta didik setelah lulus.
 - o Memberikan kegiatan positif di malam hari (pembelajaran dari tutor 2 kali per

minggu) untuk meningkatkan kualitas peserta didik.

- o Pemberian kepercayaan kepada peserta didik untuk menggunakan alat teknologi informasi (laptop/HP android) secara penuh tanggung jawab.
7. Pengembangan Kerjasama dengan Industri dan Dunia Kerja (INDUKA) di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Pengembangan kerjasama dengan industri dan dunia kerja bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu lulusan tersebut untuk terserap di dunia kerja dan sebagai lokasi praktik pada pembelajaran di SMK Kehutanan. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila fungsi penelusuran dan update informasi Industri dan Dunia Kerja maupun Dunia Usaha secara maksimal untuk membantu lulusan setelah masa pendidikan di SMKKN Pekanbaru berakhir. Melibatkan alumni untuk menceritakan *success story* dan melibatkan dunia industri dan dunia usaha/praktisi untuk memberikan materi, motivasi dan semangat kepada peserta didik agar selalu antusias mengikuti proses pembelajaran di SMK Kehutanan.



Gambar 4. Poster Pameran SMK Kehutanan Negeri, Badan P2SDM KLHK 2023

8. Peningkatan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan dari dana pemerintah untuk peningkatan/

insentif terhadap kesejahteraan pegawai untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, peningkatan sarana, prasarana, bahan-bahan dan peralatan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Untuk menyelaraskan antara penyelenggaraan SMK Kehutanan dengan program dan kebijakan pemerintah untuk menuju Indonesia Maju yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, maka perlu ada acuan atau pedoman
2. Profil lulusan SMK Kehutanan Negeri dapat dijadikan acuan/pedoman dalam penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan kehutanan yang menghasilkan SDM Kehutanan unggul mampu dan mau bekerja pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak.
3. Perlu dukungan dari pembuat kebijakan dan komitmen para pihak dalam rangka mewujudkan SDM Kehutanan yang sesuai dengan butir-butir yang ada pada profil lulusan SMK Kehutanan Negeri.
4. Perlu payung hukum dalam penyelenggaraan SMK Kehutanan berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Untuk mewujudkan SDM Kehutanan yang sesuai dengan butir-butir pada profil lulusan Sekolah Menengah Kehutanan Negeri membawa konsekuensi pengembangan dan fasilitasi berbagai aspek dalam penyelenggaraan SMK Kehutanan seperti pengembangan dan penguatan SMK Kehutanan, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, penyempurnaan PPDB, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dan tenaga administrasi, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kerjasama serta penyediaan dana yang memadai.

B. Rekomendasi

1. Perlu dukungan dan komitmen semua pihak antara lain berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan SMK Kehutanan.
2. Perlu penyediaan dana yang cukup untuk

pengembangan dan fasilitasi berbagai aspek dalam penyelenggaraan SMK Kehutanan, terutama dalam meningkatkan fasilitasi, sarana dan prasarana pendidikan SMK Kehutanan serta untuk menghasilkan SDM Kehutanan tingkat menengah yang unggul.

3. Perlu adanya kegiatan peningkatan kapasitas dan pola pikir bagi tenaga kependidikan dan tenaga administrasi penyelenggaraan SMK Kehutanan. 🌱

Daftar Pustaka

- KemenkoPMK. (2022). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No. 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kementerian coordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R.I. Jakarta.
- KLHK. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SMK Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- Ramlan, dkk. (2022). Profil Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Saronto, M.P. (2023). Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi di Indonesia Kementerian PPN/BAPPENAS. Jakarta;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

PELATIHAN DASAR-DASAR PENYULUHAN BAGI FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT AHLI



Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK. 88/DIK/TU/DIK-2/3/2023 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar-Dasar Penyuluhan Bagi Fungsional Penyuluh, penyuluhan pada hakekatnya merupakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penyuluhan lingkungan memiliki peranan yang strategis, baik dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat maupun dalam upaya pelestarian lingkungan. Dua hal penting dalam penyuluhan adalah penguatan kelembagaan dan pendampingan ke arah masyarakat mandiri yang berbasis Pembangunan lingkungan.

Pusat Diklat SDM LHK menyelenggarakan Pelatihan Dasar-Dasar Penyuluhan Bagi Fungsional Penyuluh

Kehutanan Tingkat Ahli secara *blended learning* dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang pada tanggal 3 s.d 22 Juli 2023.

Pelatihan Dasar-dasar Penyuluhan bagi Fungsional Penyuluh merupakan pelatihan dasar yang memberikan pembelajaran mengenai kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan fungsional Penyuluh. Pada pelatihan ini peserta mendapat pelajaran antara lain Kebijakan Penyuluhan dalam Pembangunan Nasional, Konsep Penyuluhan, Metode, Materi, Media, dan Alat Bantu Penyuluhan dalam Penyebarluasan Informasi, Persiapan Penyuluhan, Pendampingan Pemberdayaan Sasaran Penyuluhan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan, dan Pengantar Pengembangan Sistem Penyuluhan. 🍁

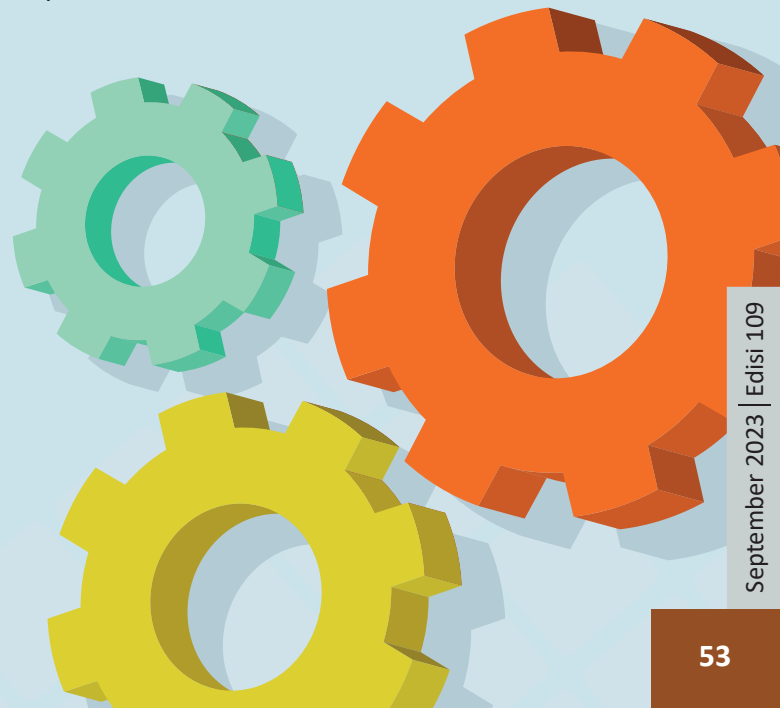
WORKSHOP PENYUSUNAN PROFIL SMK KEHUTANAN



Workshop dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juni 2023 di Hotel Onih Bogor, dengan jumlah peserta 50 orang yang merupakan perwakilan dari SMKKN Pekanbaru, SMKKN Kadipaten, SMKKN Samarinda, SMKKN Makassar, SMKKN Manokwari, SMK Bakti Rimba, SMK Bakti Nusa Sekretariat BP2SDM, Pusat Diklat SDM LHK. Penyusunan profil SMK Kehutanan ini dimaksudkan untuk merumuskan profil lulusan SMK Kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri, dalam rangka mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

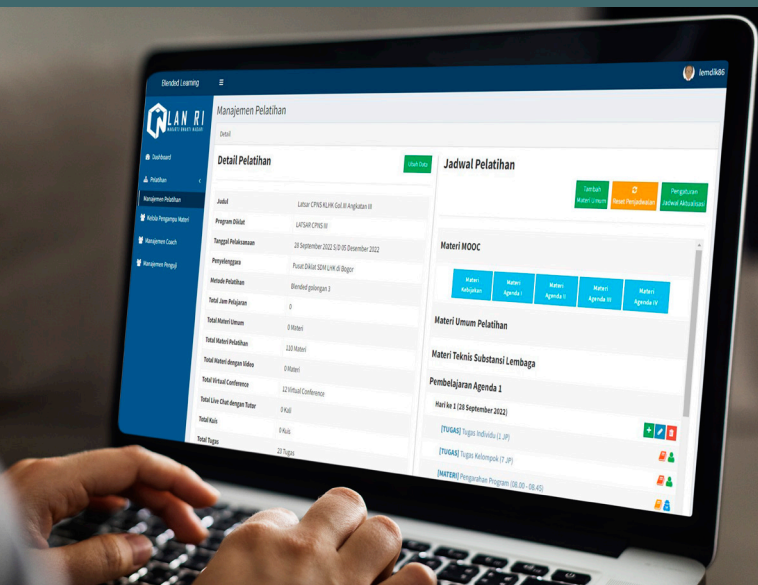
Profil lulusan dirancang berdasarkan sumber daya dan kebutuhan, visi dan misi sekolah, masukan *stakeholder*, dan *tracer study* yang menitikberatkan pada tiga poin penting yaitu bekerja, wirausaha, dan melanjutkan pendidikan. Beberapa hal yang perlu ada dalam profil lulusan antara lain: *Smart ASN*

mendukung *world class government*; Wirausaha yang kekinian tapi tetap menjaga keberlangsungan hutan; Lulusan yang memiliki nilai-nilai keagamaan dan sopan santun (pendidikan karakter); sehat dan berakhlak mulia. Hasil *workshop* telah disampaikan kepada Sekretariat BP2SDM melalui Nota Dinas Kepala Pusat Diklat SDM LHK. 🍃



PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (LATSAR CPNS) KLHK TAHUN 2023





Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Selain itu, Pemerintah sudah menetapkan nilai-nilai dasar (*core values*) BerAKHLAK sebagai dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kerja individu/ instansi. Pelatihan Dasar CPNS sebagai pelatihan terintegrasi bagi CPNS bertujuan menginternalisasikan dan mengimplementasikan *core values* ASN BerAKHLAK dalam mendukung *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) merupakan pelatihan dasar yang dilakukan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat nasionalisme dan kebangsaan, kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Calon PNS.

Peserta Latsar CPNS merupakan rekrutmen Calon PNS Kementerian LHK Tahun 2022 sejumlah 36 orang yang terdiri dari Golongan III. Penyelenggaraan

Latsar CPNS Ini dilaksanakan bertahap menjadi 3 gelombang secara *blended learning* pada Pusat Diklat SDM LHK diawali Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) pada tanggal 10 Juni s.d 10 Juli 2023, *Massive Open Online Course* (MOOC) pada tanggal 11 s.d 29 Juli 2023, Fase *Elearning* 31 Juli s.d 31 Agustus 2023, Aktualisasi Di Tempat Kerja pada tanggal 31 Agustus s.d 3 Oktober 2023 kemudian Fase Klasikal pada tanggal 5 s.d 11 Oktober 2023 di Pusat Diklat SDM LHK.

Pelatihan ini diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) orang peserta. Yang berasal dari Inspektorat Jenderal (16 orang), Direktorat Jenderal PDASRH (2 orang) Direktorat Jenderal PPI (1 orang), Badan Standardisasi Instrumen (2 orang), Direktorat Jenderal PKTL (1 orang), Sekretariat Jenderal (10 orang), Direktorat Jenderal PHL (2 orang), Direktorat Jenderal PSLB3 (1 orang) dan Direktorat Jenderal PSKL (1 orang).

Pengajar adalah Widyaiswara dari Pusat Diklat SDM LHK, Sekretariat Jenderal KLHK, Biro Kepegawaian KLHK, Lembaga Administrasi Negara dan Pakar serta dengan melibatkan seluruh widyaiswara sebagai pengajar dan penguji.

Dalam pelaksanaannya, pada fase online peserta mengikuti *Massive Open Online Course* (MOOC) yang merupakan pembelajaran mandiri melalui website Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan login ke <https://kolabjar-asnpintar.lan.go.id>. Selain melalui website LAN, penyelenggaraan Latsar CPNS juga melalui *Learning Management System* (LMS) KLHK. Kemudian peserta melakukan habituasi selama 1 bulan pada unit kerja masing-masing. Pada fase offline, peserta mengikuti pelatihan secara tatap muka untuk mendapatkan pendalaman dan penguatan materi oleh para widyaiswara serta melakukan seminar laporan hasil aktualisasi.

Adapun materi yang diajarkan terdiri dari Agenda 1 (wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela Negara); Agenda 2 (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif); Agenda 3 (*Smart* ASN, Manajemen ASN) dan Agenda 4 (Habituasi). 🌱

PELATIHAN PEMBIBITAN VEGETATIF MULTI PURPOSE TREE SPECIES (MPTS) ANGKATAN I DAN II



Pelatihan Pembibitan Vegetatif *Multi Purpose Tree Species* (MPTS) dilaksanakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam melakukan pembibitan vegetatif MPTS dengan baik. Untuk itu, peserta akan mendapat materi tentang Pemilihan Pohon Induk, Pembuatan.

Bibit Vegetatif, Pemeliharaan Bibit, serta Seleksi Bibit dan Pengangkutan. Pusat Diklat SDM LHK melaksanakan pelatihan ini sebanyak 2 (dua) Angkatan, Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 10 Juni 2023 sedangkan Angkatan II dilaksanakan tanggal 15 s.d 21 Juni 2023 terdiri dari teori dan praktik. Metode pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu pembelajaran metode klasikal, *e-learning*, atau *blended learning* (perpaduan metode klasikal dan *e-learning*). Proses pembelajaran dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, yaitu: ceramah interaktif, diskusi, penugasan, simulasi, dan praktik lapang.

Pembelajaran dengan metode klasikal di Kampus Pusat Diklat SDM LHK Bogor, materi pelatihan teori disampaikan di kelas, sedangkan materi praktik dilakukan di Kebon Wa Reza Cijeruk, RSSNC dan Persemaian Modern Rumpin, BPDAS Citarum Ciliwung. Proses pembelajaran tatap muka untuk mata pelatihan praktik dilaksanakan secara *team teaching*.





PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) TAHUN 2023

Dalam rangka mendukung terwujudnya *world class bureaucracy*, pada setiap instansi pemerintah diperlukan sosok pejabat struktural (JPT Madya, JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas) yang memiliki kompetensi kepemimpinan kolaboratif, strategis, kinerja, atau pelayanan dalam peningkatan kinerja unit organisasinya.

Untuk mengembangkan kompetensi pejabat struktural dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial, dapat diwujudkan melalui Pelatihan Struktural sebagaimana diamanatkan berdasarkan ketentuan Pasal 217 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu

Pusat Diklat SDM LHK menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 6 fase, fase pertama pembelajaran mandiri pada MOOC tanggal 12. S.d 26 Juli 2023, fase kedua pembelajaran *E-Learning* tanggal 27 Juli s.d 11 Agustus 2023, fase ketiga pembelajaran pembangunan komitmen bersama tanggal 15 s.d 18 Agustus 2023, saat ini sedang berlangsung fase keempat pembelajaran klasikal tahap I tanggal 21 Agustus s.d 7 September 2023 di Kampus Pusat Diklat SDM LHK, fase kelima pembelajaran aktualisasi kepemimpinan pelayanan dan pelaksanaan pengembangan potensi diri tanggal 11 september s.d 10 November 2023, fase keenam pembelajaran klasikal tahap II tanggal 13 s.d 15 November 2023. 🌿





PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2023

Pelatihan Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial merupakan upaya memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja masyarakat pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial terhadap substansi kegiatan perencanaan hutan dalam pengelolaan perhutanan sosial. Materi pokok yang diberikan pada pelatihan ini mencakup: SIG dan pemetaan, pengukuran dan penataan areal kerja, inventarisasi potensi areal kerja, dan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial.

Pelatihan ini berlangsung selama 7 hari mulai tanggal 23 Mei s.d. 1 Juni 2023 dengan menggunakan pola *blended-learning*, yaitu untuk teori secara online melalui *Learning Management System* (LMS) KLHK dilaksanakan tgl 23-25 Mei 2023 dan praktik dilakukan secara tatap muka di Bapelkes, Banjarbaru pada tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 2023. Peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan berjumlah 40 orang yang berasal dari Kelompok Perhutanan Sosial

dan pendamping di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun pengajar/narasumber pelatihan ini berasal dari Widyaiswara Pusat Diklat SDM LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, BPSKL Wilayah Kalimantan, dan Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.





SOSIALISASI PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)

Hal yang sering disalahartikan di masyarakat adalah menyatakan bahwa gender sama dengan jenis kelamin, atau mengartikan gender pasti selalu terkait dengan perempuan. Gender juga bukan didasarkan pada perbedaan biologis. Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang mengacu pada konsep perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan (rekayasa) sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen pemerintah Indonesia dan khususnya KLHK yang telah menetapkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional pada Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta Peraturan MenLHK Nomor P.31 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tentunya, seluruh lapisan masyarakat Indonesia baik ASN maupun Non-ASN dalam hal ini memiliki Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) yang sama dalam pembangunan, terlebih seorang ASN KLHK."

Sejalan dengan hal tersebut, Pusdiklat SDM LHK mengadakan Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang akan dilaksanakan secara Massive Open Online Course (MOOC) sebanyak 20 JP yang dapat diakses dan diikuti secara gratis oleh seluruh lapisan ASN KLHK di manapun berada.

Tahap awal pelaksanaan MOOC, diawali dengan Sosialisasi MOOC yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2023 melalui zoom meeting. Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Ketua Pokja PUG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



PELATIHAN PEMBENTUKAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) merupakan salah satu jabatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jabatan fungsional ini terbuka bagi PNS yang bertugas di Instansi Pusat maupun Instansi Daerah. Jabatan Fungsional Pedal mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Pusat Diklat SDM LHK menyelenggarakan Pelatihan Pembentukan Pengendali Dampak Lingkungan di Pusat Diklat SDM LHK dengan menggunakan

metode *Blended Learning*. Sampai dengan saat ini Pusat Diklat SDM LHK telah melaksanakan Pelatihan Pembentukan Pengendali Dampak Lingkungan sebanyak 3 angkatan. Angkatan I mulai tanggal 5 s.d 14 April 2023. Angkatan 2 selama 8 (delapan) hari, mulai tanggal 14 Juni 2023 s/d 21 Juni 2023 pelatihan ini diikuti oleh 30 orang, dan Angkatan 3 dilaksanakan mulai tanggal 4 Juli 2023 s/d 12 Juli 2023 diikuti oleh 30 orang yang berasal dari Ditjen PSLB3, Ditjen Gakkum, Badan Standardisasi dan Instrumen LHK, serta Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Jawa Sekretariat Jenderal. Pengajar adalah Widyaiswara dari Pusat



Diklat SDM LHK, Ditjen PPKL, Ditjen PPKL, Ditjen PDAS RH, Ditjen PHL, Ditjen KSDAE dan Pakar.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan fungsional Pedal dalam melaksanakan kegiatan teknis pengendalian dampak lingkungan. Dimana Kegiatan teknis tersebut terdiri atas pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan serta pengelolaan B3 dan limbah B3, pemantauan kualitas lingkungan, serta pengembangan perangkat PPLH. Selain 4 kompetensi tersebut di atas, sebagai fungsional juga harus memiliki pengetahuan terkait penulisan karya ilmiah dan penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi seorang fungsional dalam menapaki jenjang

karirnya. Terdapat dua skema yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pelatihan ini, yaitu : 1) klasikal; 2) non klasikal (*e-learning*). Skema klasikal dilakukan dengan tatap muka di kelas, yang terdiri atas materi teori dan praktik.

Skema non klasikal (*e-learning*) dilakukan dengan teknik pembelajaran *synchronous* (melalui *teleconference, live chat*) dan *asynchronous* (melalui modul/bahan ajar elektronik, forum diskusi, penugasan/*quiz*). Pengaturan JP pada skema non klasikal (*E-learning*) diatur dalam skenario dan jadwal pelatihan. Pada akhir pembelajaran dengan dua skema di atas akan dilakukan evaluasi hasil belajar melalui pemaparan DUPAK yang telah disusun secara perorangan. Proses pembelajaran pada pelatihan ini dilaksanakan secara partisipatif dengan prinsip pembelajaran orang dewasa. Materi pelatihan terdiri dari 50 Jam Pelajaran (JP). 🌊

”

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami ruang lingkup tugas, fungsi dan wewenang fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, serta mampu menyusun DUPAK.

”



KETENTUAN PENULISAN DI MAJALAH SILVIKA TAHUN 2023

KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

1. Karya Tulis Ilmiah/KTI, meliputi:

- Laporan hasil Penelitian/Pengkajian/Survey: tulisan sebagai hasil pelaksanaan suatu penelitian/pengkajian/survey yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas.
- Tinjauan/Ulasan: tulisan yang mencoba menjawab suatu persoalan khusus dengan jalan menganalisis pelbagai hasil kegiatan kecendekiaan orang yang sudah diterbitkan sebelumnya, dengan pendekatan yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin bahwa simpulannya didukung oleh sekumpulan data dan informasi ilmiah terkait (dikenal dengan istilah literature review atau article review).
- Prasaran: buah pikiran yang diajukan dalam suatu pertemuan, seperti konferensi, muktamar, dan dimaksudkan sebagai bahan untuk menyusun hasil pertemuan dan sebagainya, bentuknya berupa makalah.

2. Ketentuan Penulisan KTI:

- Pada sudut kanan atas naskah ditulis KTI
- Naskah: 8-15 halaman, spasi 1,5 pt, ukuran kertas A4, margin 3 cm di semua tepi, jenis huruf Calibri, font 12.
- Judul: harus jelas dan menggambarkan isi tulisan, ringkas, ditulis dengan huruf kapital.
- Nama penulis: ditulis di tengah di bawah judul, tanpa gelar, dicantumkan jabatan, asal instansi dan alamat email (bagi penulis pertama).
- Abstrak/Abstract: dalam bahasa Inggris, maksimal 200 kata, berisi intisari (permasalahan, metode, hasil dan kesimpulan penting yang diperoleh), tanpa mencantumkan pustaka/acuan dan tanpa singkatan/akronim.
- Kata Kunci/Keywords: ditulis di bawah abstrak, terdiri atas 3-5 kata
- Penomoran tubuh naskah tulisan: diatur dalam Bab dan Sub bab secara konsisten, dengan rincian sebagai berikut
 1. Bab: I, II, III dst
 2. Subbab: A, B, C, dst
 3. Sub Subbab: 1, 2, 3, dst
 4. Sub sub subbab: a, b, c, dst
- Tabel, Gambar/Grafik: diberi nomor dan keterangan serta dijelaskan dalam naskah.
- Foto atau gambar yang ditampilkan proporsional dengan jumlah/banyaknya naskah tulisan, jumlah foto/gambar tidak mendominasi atau lebih banyak dari isi tulisan, misal, dalam tiga halaman naskah tulisan terdapat satu hingga dua foto/gambar yang ditampilkan dan berkaitan dengan isi tulisan.
- Daftar Pustaka:
 1. Penulisan referensi/pustaka pada tubuh naskah diselipkan di dalam tulisan naskah.
 2. Style penulisan referensi: APA Sixth edition
 3. Merupakan referensi/pustaka yang dirujuk dalam naskah.
 4. Pustaka berasal dari buku, jurnal, prosiding, dokumen atau internet. Situs personal seperti blog yang tidak jelas status dan nilai ilmiahnya tidak dapat dijadikan sebagai sumber pustaka.

3. Struktur/Anatomi KTI Hasil Penelitian/Pengkajian/Survey

- Judul
- Nama Penulis
- Jabatan Penulis, asal instansi, alamat email (bagi penulis pertama)
- Abstrak
- Kata Kunci
- Tubuh naskah tulisan:
 1. Pendahuluan: memuat latar belakang, alasan memilih tema/topik, uraian singkat terkait masalah yang diambil/ rumusan masalah, pembahasan terkait ruang lingkup, dan tujuan penelitian yang mengarah kepada solusi yang diberikan.
 2. Metode Penelitian: memuat prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah, diantaranya jenis penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

3. Hasil dan Pembahasan: memuat landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan, pembahasan hasil pengolahan data dan analisis data/analisis kasus.
 4. Kesimpulan dan Rekomendasi: memuat kesimpulan akhir apakah penelitian yang dilakukan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkat serta memberikan penjelasan terkait saran dan rekomendasi ke depannya.
- Daftar Pustaka
4. Struktur/Anatomi KTI Tinjauan/Ulasan
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Jabatan Penulis, asal instansi, alamat email (bagi penulis pertama)
 - Abstrak
 - Kata Kunci
 - Tubuh naskah tulisan:
 1. I. Pendahuluan: mengandung latar belakang masalah, rumusan/identifikasi masalah, tujuan
 2. II, III, IV, dan seterusnya: merupakan Bab-bab inti naskah tulisan
 3. Nomor Bab terakhir: Kesimpulan dan Rekomendasi
 - Daftar Pustaka
 5. Struktur/Anatomi KTI Prasaran
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Jabatan Penulis, asal instansi, alamat email (bagi penulis pertama)
 - Tubuh naskah tulisan:
 1. I. Pendahuluan: mengandung latar belakang masalah, rumusan/identifikasi masalah, tujuan
 2. II, III, IV, dan seterusnya: merupakan Bab-bab inti naskah tulisan
 3. Nomor Bab terakhir: Kesimpulan dan Rekomendasi
 - Daftar Pustaka

Naskah tulisan dikirimkan ke
Sekretariat Redaksi
Majalah Silvika melalui email:
majalahsilvika@yahoo.com
Informasi lebih lanjut dapat
menghubungi Desti Putri H.
HP. 08113340111

KARYA TULIS POPULER

1. Karya Tulis Populer: merupakan ulasan/tinjauan penulis terhadap suatu topik/tema, menggunakan bahasa/kalimat populer yang mudah dipahami.
2. Karya Tulis Populer, meliputi:
 - Opini: tulisan atau karangan yang mengemukakan pendapat, pikiran atau pendirian disertai alasan yang kuat. Opini ditulis dengan tujuan meyakinkan pembaca akan kebenaran pendapat, pikiran, atau pendirian.
 - Esai: Memuat pendapat penulis tentang suatu persoalan ditinjau secara subjektif dari sudut pandang penulis, berisi kombinasi fakta dan opini, dapat bersifat analitis, spekulatif dan interpretatif, dapat berupa kritik, argumen dari pengamatan sehari-hari dan refleksi penulis.
 - Resensi Buku: tulisan dari hasil kegiatan mengupas, mengevaluasi, mempertimbangkan, mengkritik, membedah substansi sampai memberikan komentar kepada sebuah buku.
 - Editorial: menyajikan pandangan atau pendapat redaksi terhadap isu-isu kediklatan/lingkungan hidup dan kehumanan terkini dan berusaha untuk mempengaruhi pembaca dengan argumen dan opini yang kuat.
3. Ketentuan penulisan Karya Tulis Populer sebagai berikut:
 - Pada sudut kanan atas naskah ditulis Karya Tulis Populer.
 - Naskah: terdiri dari 5-10 halaman, spasi 1,5 pt, ukuran kertas A4, margin 3 cm pada semua tepi, jenis huruf Calibri font 12.
 - Judul: harus jelas dan menggambarkan isi tulisan, ringkas, ditulis dengan huruf kapital, diposisikan di tengah.
 - Nama penulis: ditulis di tengah di bawah judul, tanpa gelar, dicantumkan jabatan, asal instansi dan alamat email (bagi penulis pertama).
 - Tabel, Gambar/Grafik: diberi nomor dan keterangan serta dijelaskan dalam naskah.
 - Foto atau gambar yang ditampilkan proporsional dengan jumlah/banyaknya naskah tulisan, jumlah foto/gambar tidak mendominasi atau lebih banyak dari isi tulisan, misal, dalam tiga halaman naskah tulisan terdapat satu hingga dua foto/gambar yang ditampilkan dan berkaitan dengan isi tulisan.
4. Struktur/Anatomi naskah Karya Tulis Populer:
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Jabatan penulis, asal instansi, alamat email (bagi penulis pertama)
 - Tubuh naskah tulisan dapat terdiri atas: Pendahuluan, Isi/Pembahasan, Penutup/Kesimpulan

PELEPASAN PNS PURNATUGAS



Pelepasan PNS Purnatugas Pusat Diklat SDM LHK periode Mei s.d Agustus 2023 yang dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2023 di Joglo Pusat Diklat SDM LHK. PNS yang purnatugas yaitu Ir. Antung Deddy Rahadian, M.Pd dan Theresia Koeswinarning, SH.

Terimakasih atas jasa-jasa dalam mengembangkan dan memajukan Pusat Diklat SDM LHK. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga.





Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

“ Tekadku Pengabdian Terbaik



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105057951

